

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

📍 Jalan Satria No.3 Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55812

✉️ bapperida@gunungkidulkab.go.id 🌐 bappeda.gunungkidulkab.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wongas, 31 Desember 2025



MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP, M.Si
NIP. 197502221993111001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan “Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang akuntabel serta inovasi daerah yang berkualitas” :

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan dua indikator yaitu Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan dan Indeks Inovasi Daerah. Dengan target Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan sebesar 27,20 dan capaian Nilai AKIP berdasar hasil sementara periode triwulan II tahun 2025 sebesar 25,57, maka tujuan sudah tercapai 94 persen dan Target Inovasi Daerah sebesar 4807 atau dalam penyesuaian perubahan indeks inovasi daerah Kemendagri sebesar 46,95 pada tahun 2025 terealisasi 52,75%.

2. Capaian Sasaran Strategis 1 “Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah”

- Pencapaian target sasaran ini diukur dengan indikator persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 100%; pada tahun 2025 terealisasi 97,82%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Realisasi terhadap target 97,82%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 97,74% terjadi peningkatan sebesar 0,08%.



3. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah”:
- Diukur dengan indikator Indeks Inovasi Daerah (Menunjukkan jumlah total nilai inovasi daerah yang terverifikasi berdasarkan penilaian dari Kemendagri).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 4457 atau dalam penyesuaian perubahan indeks inovasi daerah Kemendagri sebesar 46,95 pada tahun 2025 terealisasi 52,75%
4. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”:
- Diukur dengan indikator Nilai AKIP PD
 - Indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 87,18; pada tahun 2025 terealisasi 86,80. Dengan demikian kinerja Bappeda Kabupaten Gunungkidul telah mencapai target. Realisasi terhadap target mencapai 99,56%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Menyusun prioritas pembangunan dengan prinsip berkualitas, efektif dan efisien;
2. Perumusan perencanaan kebijakan dan teknis berdasarkan penelitian dan pengembangan;
3. Mewujudkan sinergitas perencanaan sektoral dan kewilayahan;
4. Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran di internal Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat;



5. Mewujudkan sinergitas kebijakan dan tata kala perencanaan pembangunan dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat;
6. Mensinergikan perencanaan pembangunan perangkat daerah dan perencanaan pembangunan daerah kapanewon dan kalurahan;
7. Meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan daerah.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	4
D. Tugas dan Fungsi	5
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	8
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	11
B. Strategi dan Arah Kebijakan	12
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	13
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	26
B. Capaian Kinerja Lainnya.....	52
C. Efisiensi Anggaran.....	58
BAB IV PENUTUP.....	62
LAMPIRAN	65



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	8
Tabel I. 2 Sarana-Prasarana	9
Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2025	10
Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Perencanaan	12
Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan	13
Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	13
Tabel II. 4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	17
Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	19
Tabel II. 6 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	20
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025	26
Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	28
Tabel III. 4 Capaian Sasaran Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	29
Tabel III. 5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	30
Tabel III. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	31
Tabel III. 7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	32
Tabel III. 8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	42
Tabel III. 9 Capaian Sasaran Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah ..	43
Tabel III. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	44
Tabel III. 11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	44



Tabel III. 12	Capaian Kinerja Program Pada Sasaran Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah.....	45
Tabel III. 13	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	47
Tabel III. 14	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	48
Tabel III. 15	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 ...	48
Tabel III. 16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	50
Tabel III. 17	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	50
Tabel III. 18	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	50
Tabel III. 19	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.....	58
Tabel III. 20	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Cascading Kinerja	3
Gambar I. 2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Bappeda Kabupaten Gunungkidul	5
Gambar II. 1 E-SAKIP	21
Gambar II. 2 SIPANDA.....	21
Gambar II. 3 SIPD KEMENDAGRI	22
Gambar II. 4 SIPD Penatausahaan	22
Gambar II. 5 Aplikasi DIOS	23
Gambar II. 6 Aplikasi E - Musren.....	23
Gambar II. 7 Aplikasi SRIKANDI	24
Gambar II. 8 Aplikasi APIK dan Mobsi	24
Gambar II. 9 Aplikasi SINOMAN	25



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 mengatur tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk menilai implementasi sistem akuntabilitas secara konsisten, berorientasi hasil, dan mendorong peningkatan kinerja

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang



telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

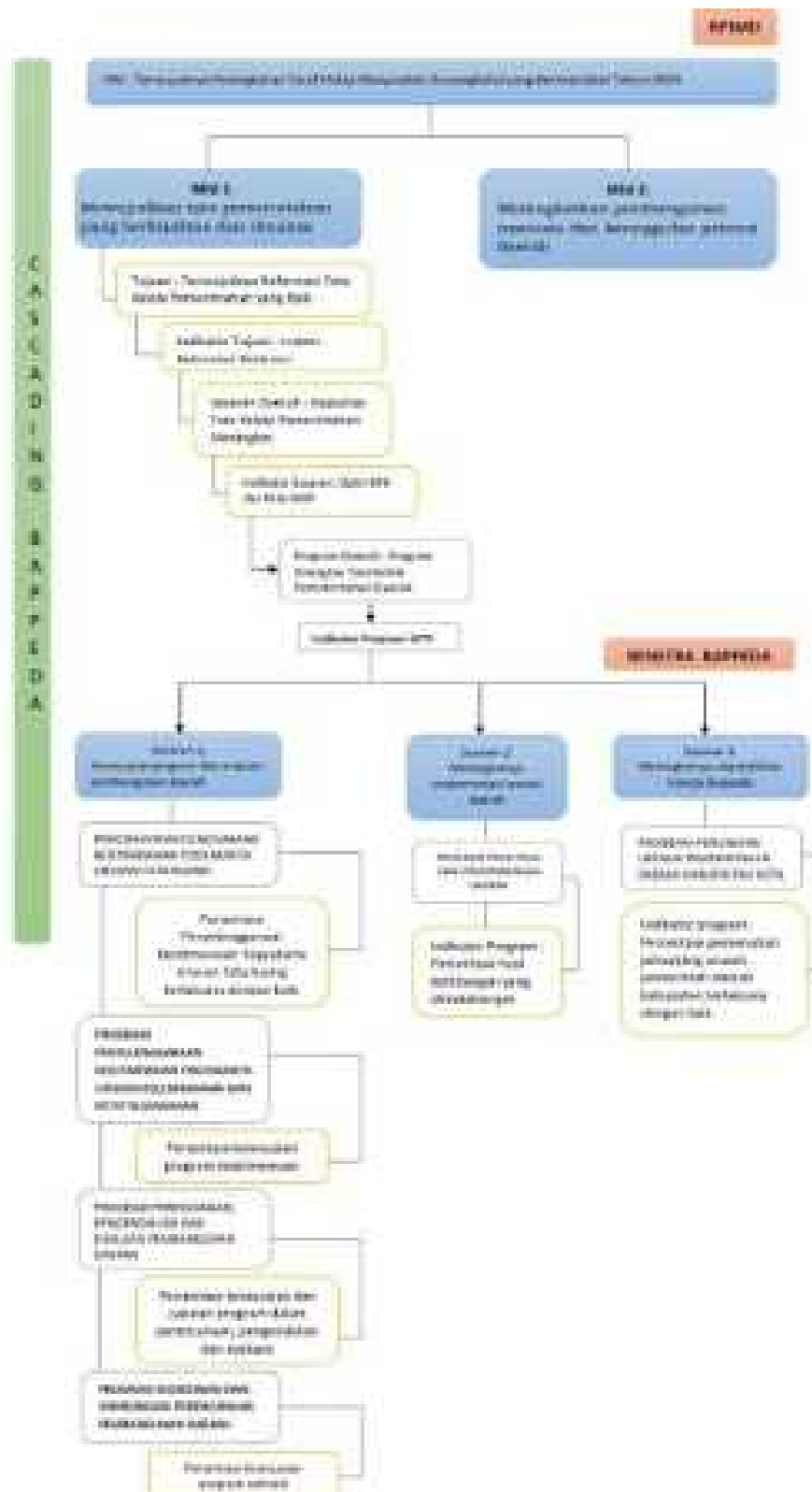
Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Bappeda Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Bappeda Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

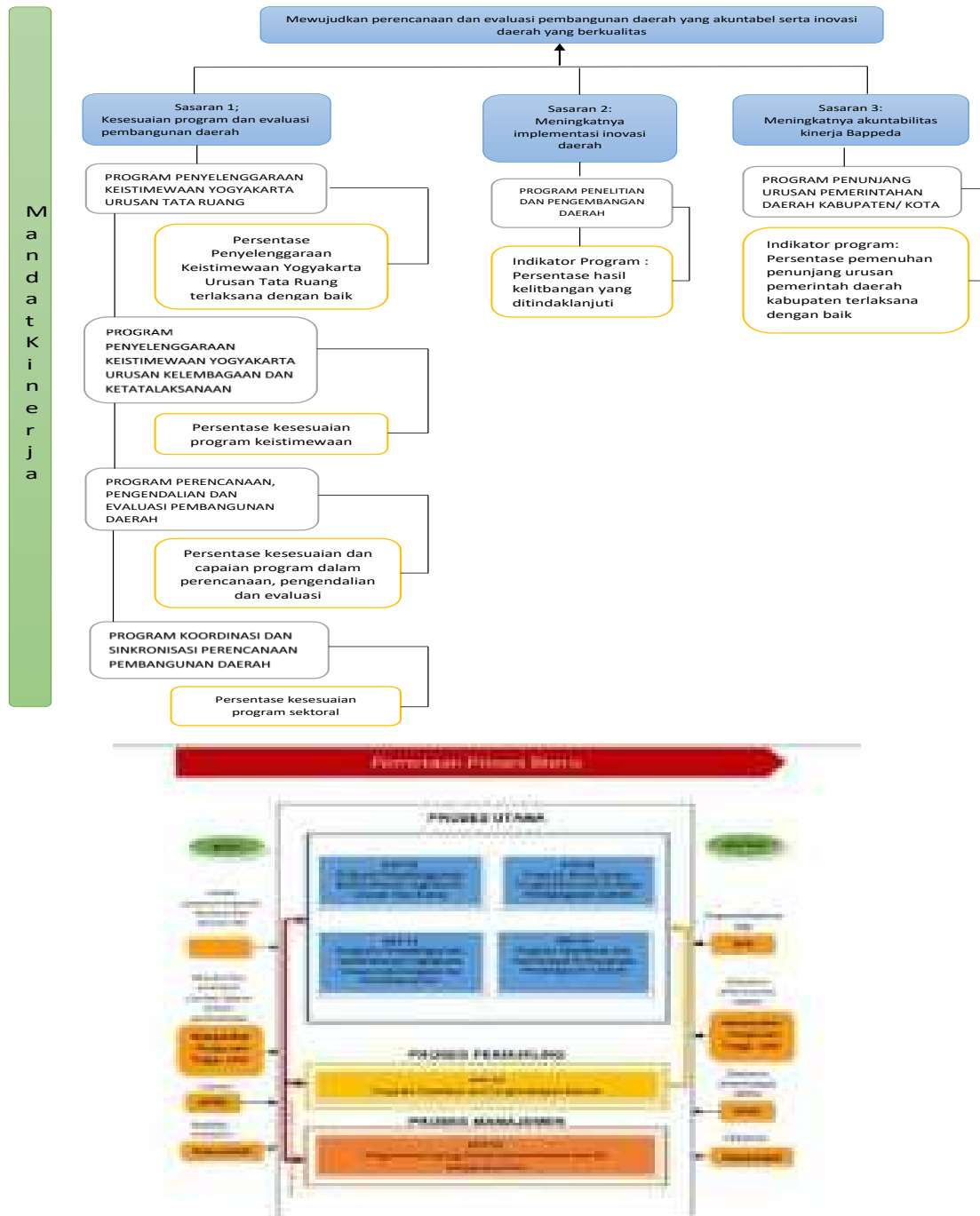


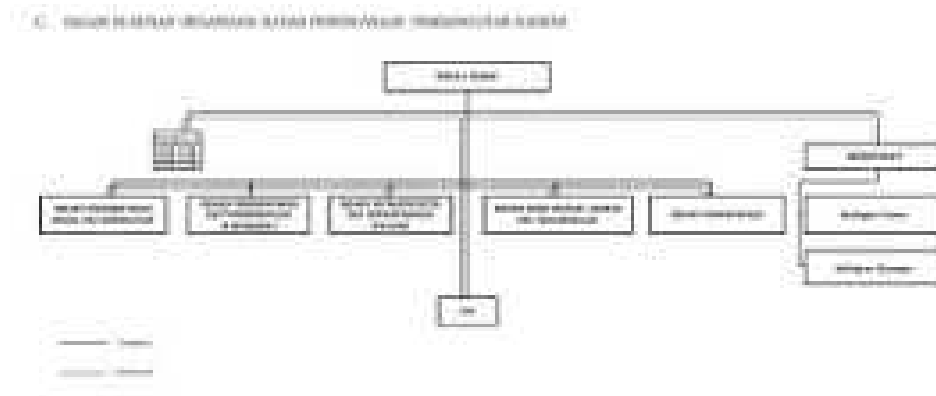
Gambar I. 1 Cascading Kinerja



C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Bappeda Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:





Gambar I. 2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Bappeda
Kabupaten Gunungkidul

D. Tugas dan Fungsi

Bappeda Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025. Adapun tugas pokok dan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan.

Bappeda Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan serta mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian penugasan urusan Keistimewaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi sebagai berikut:



1. perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
4. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
5. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
6. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah;
7. pengoordinasian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;
8. pengoordinasian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
9. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
10. penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah, Kapanewon, dan Kalurahan;
11. perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, swasta, dalam negeri dan luar negeri;
12. pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
13. penyusunan rencana pembangunan daerah;
14. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
15. penyusunan dan pelaksanaan pedoman keserasian pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan;
16. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;



17. penyusunan petunjuk teknis pembangunan skala Kapanewon dan Kalurahan;
18. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
19. penyusunan perencanaan kawasan strategis;
20. penyusunan perencanaan kawasan pemukiman;
21. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;
22. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah;
23. pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
24. pelaksanaan bimbingan, supervise, dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
25. perencanaan pembangunan daerah;
26. pengendalian rencana pembangunan daerah;
27. evaluasi rencana pembangunan daerah;
28. pembinaan rencana pembangunan Perangkat Daerah;
29. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah, Kapanewon, dan Kalurahan;
30. pelaporan tugas pembantuan, hibah, dan bantuan;
31. pengoordinasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
32. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
33. penyusunan dan penetapan norma, standard, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
34. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
35. pengelolaan, UPT.



E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Secara internal, permasalahan/kendala yang dihadapi Bappeda Kabupaten Gunungkidul antara lain sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) perencanaan;
2. Terbatasnya fasilitas, sarana dan kualitas prasarana pendukung yang baik bagi proses dan lembaga perencanaan pembangunan daerah;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara *reliable* dan akurat;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan jika dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ada; dan
5. Masih terbatasnya jumlah SDM dengan jabatan fungsional perencanaan.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana di Bappeda Kabupaten Gunungkidul adalah sebagaimana berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki	Perempuan
1	2	3	4					5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA	SD		S2	S1	D3	SMA	SD		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1					1	1					1	
B.	Jabatan Administrasi														
	a. Administrator	6	3	3				6	5	1				3	3
	b. Pengawas	2		2				2		1	1				2
	c. Pelaksana	68		21	28	18	1	20		14	6	4		10	14
C.	Jabatan Fungsional	35	12	23				9	3	6				6	3
	Jumlah	112	16	49	28	18	1	42	9	22	7	4		20	22

Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Kabupaten Gunungkidul Desember 2025



Berdasarkan data pada tabel 1.1 tingkat pendidikan SDM Bappeda Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 22 orang (52,39%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 9 orang (21,42%), D3 sebanyak 7 orang (16,67%), SLTA sebanyak 4 orang (9,52%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding dengan pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun sama banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Jumlah pegawai pada Bappeda saat ini terdiri dari 1 (satu) Pejabat Tinggi Pratama, 6 (enam) Pejabat Administrator, 2 (dua) Pejabat Pengawas dan 20 (dua puluh) Pejabat Pelaksana serta 9 (sembilan) Pejabat Fungsional.

Untuk mendukung optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat dan kelancaran pelaksanaan program kegiatan perlu adanya penambahan pegawai baik melalui mekanisme CPNS ataupun PPPK pejabat pelaksana teknis dan pejabat pelaksana administrasi.

Tabel I. 2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
Aset Tetap			
1	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1 unit	1.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	780 unit	3.800.472.754,78
3	Gedung dan Bangunan	6 unit	1.698.860.549,72
Aset Tetap Lainnya			
1	Buku Perpustakaan	103 buku	9.201.700,00
Aset Tidak Berwujud			
1	Software	9 unit	1.088.495.000,00
2	Kajian	40 unit	3.433.031.427,00
3	Aset Tidak Berwujud Lainnya	59 unit	5.318.656.366,00
Aset Lain-Lain			
1	Aset Rusak Berat/Usang	6 unit	23.340.500,00
2	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	2 unit	25.400.000,00
Jumlah			15.398.458.297,50

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2025 (Unaudited)



Kendaraan dinas terdiri dari yakni 2 (dua) unit kendaraan dinas jabatan, 6 (enam) unit kendaraan operasional, dan 18 (delapan belas) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang sekretariat dan bidang-bidang, ruang arsip, mushola, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik.

Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
			Jumlah Pendapatan	Rp0	Rp0	Rp0
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp7.426.258.165	Rp8.869.477.319	Rp1.443.219.154
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.568.237.192	Rp5.470.234.346	Rp1.901.997.154
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.858.020.973	Rp3.399.242.973	(Rp458.778.000)
5	2		BELANJA MODAL	Rp579.300.000	Rp693.100.000	Rp113.800.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp29.300.000	Rp64.100.000	Rp34.800.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp550.000.000	Rp629.000.000	Rp79.000.000
			Jumlah Belanja	Rp8.005.558.165	Rp9.562.577.319	Rp 1.557.019.154
			Total Surplus/(Defisit)	Rp8.005.558.165	Rp9.562.577.319	Rp 1.557.019.154

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3. untuk tahun 2025 Anggaran Bappeda Kabupaten Gunungkidul semula Rp8.005.558.165,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp9.562.577.319,00 atau bertambah Rp1.557.019.154,00 Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan salah satu upaya Bappeda Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja Bappeda Kabupaten Gunungkidul.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gunungkidul sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan *cascading* kinerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah, yaitu meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Peran tersebut dijalankan melalui fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi serta penguatan inovasi daerah, yang dilaksanakan melalui program sinergitas tata kelola pemerintahan.

Kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga oleh kualitas perencanaan pembangunan, konsistensi evaluasi kinerja pembangunan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong dan mengelola inovasi secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Bappeda menjadi



perangkat daerah kunci yang memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Sejalan dengan peran tersebut, tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah, yaitu:

**Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang akuntabel serta inovasi daerah yang berkualitas	Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan	Skor	25,86					27,20	27,20
		Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026	indeks	3717					4807	4807
1.1	Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan	persen	98,23	100	100	100	100	100	100
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai AKIP Bappeda	skor	A 83,45	A 85,66	A 86,54	A 86,97	A 87,18	A 87,40	A 87,40
1.3	Meningkatnya implementasi inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	indeks	3717	3837	3977	4177	4457	4807	4807

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh PD untuk mengacu pada RPJMD dan prioritas daerah dalam menyusun dokumen perencanaan PD
2.	Meningkatnya implementasi inovasi daerah	Peningkatan fasilitasi penelitian dan implementasi inovasi daerah	Mewujudkan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi serta mendorong peningkatan inovasi daerah
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Peningkatan koordinasi internal untuk mencapai nilai AKIP yang optimal	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh Bidang untuk mengoptimalkan perencanaan dan pencapaian kinerja

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Bappeda Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait
Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	819.076.500	697.456.500	(121.620.000)
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	348.037.500	332.347.500	(15.690.000)
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	348.037.500	332.347.500	(15.690.000)
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	471.039.000	365.109.000	(105.930.000)
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	295.800.000	209.850.000	(85.950.000)

LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	175.239.000	155.259.000	(19.980.000)
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	999.344.500	1.014.480.000	15.135.500
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	745.757.000	773.422.500	27.665.500
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	22.010.000	19.150.000	(2.860.000)
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	93.930.000	74.650.000	(19.280.000)
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	34.920.000	22.990.000	(11.930.000)
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	594.897.000	656.632.500	61.735.500
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	146.025.000	142.775.000	(3.250.000)
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	70.815.000	69.015.000	(1.800.000)
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	75.210.000	73.760.000	(1.450.000)
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	107.562.500	98.282.500	(9.280.000)
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	54.287.500	49.147.500	(5.140.000)

LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	53.275.000	49.135.000	(4.140.000)
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	844.992.900	793.234.900	(51.758.000)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	249.297.500	184.372.500	(64.925.000)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	119.862.500	80.987.500	(38.875.000)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.950.000	24.800.000	(4.150.000)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100.485.000	78.585.000	(21.900.000)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	134.850.400	211.167.400	76.317.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.777.400	36.307.400	7.530.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	86.953.000	64.640.000	(22.313.000)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.120.000	110.220.000	91.100.000

**LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	460.845.000	397.695.000	(63.150.000)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	249.110.000	141.460.000	(107.650.000)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	27.900.000	20.590.000	(7.310.000)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	183.835.000	235.645.000	51.810.000
Meningkatnya implementasi inovasi daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	529.277.100	450.617.100	(78.660.000)
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	529.277.100	450.617.100	(78.660.000)
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	298.347.300	222.057.300	(76.290.000)
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	213.839.800	211.469.800	(2.370.000)
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	17.090.000	17.090.000	0,00
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		3.192.691.000	2.955.788.500	(236.902.500)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025



Tabel II. 4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian
Sasaran Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.812.867.165	6.606.788.819	1.793.921.654
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.241.500	52.296.500	(3.945.000)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.830.000	41.035.000	(795.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	513.000	513.000	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	405.000	405.000	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	750.500	750.500	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	640.000	640.000	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.745.000	1.745.000	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.333.000	1.333.000	0,00
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.025.000	5.875.000	(3.150.000)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.603.297.092	5.504.973.546	1.901.676.454
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.568.237.192	5.470.234.346	1.901.997.154
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.154.900	821.200	(333.700)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	33.905.000	33.918.000	13.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.353.260	47.333.260	(1.020.000)
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.053.260	22.033.260	(1.020.000)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.300.000	25.300.000	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.322.365	270.832.565	(88.489.800)
	Penyediaan Komponen Instalasi	6.165.665	12.185.165	6.019.500

LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.343.500	114.325.200	36.981.700
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.350.000	2.350.000	0,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.231.200	8.111.200	(120.000)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.440.000	12.440.000	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.592.000	120.221.000	(131.371.000)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.300.000	8.300.000	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.300.000	8.300.000	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.045.038	223.045.038	0,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	800.000	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.746.508	120.746.508	0,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.498.530	101.498.530	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.307.910	500.007.910	(14.300.000)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	293.824.000	294.024.000	200.000
	Pemeliharaan Mebel	1.040.000	1.040.000	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.900.000	14.900.000	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.943.910	183.443.910	(8.500.000)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.600.000	6.600.000	(6.000.000)
	Total Anggaran Pendukung	4.812.867.165	6.606.788.819	1.793.921.654

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut :

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
I	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang akuntabel serta inovasi daerah yang berkualitas	Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan	skor	27,20
		Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026	indeks	57,02

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	persen	100
2.	Meningkatnya implementasi inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	indeks	56,31
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai AKIP Bappeda	skor	87,18

Pada tahun 2025, Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan penetapan target kinerja, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel II. 6 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
I	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang akuntabel serta inovasi daerah yang berkualitas	Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan	skor	25,47
		Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026	indeks	46,95

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	persen	100
2.	Meningkatnya implementasi inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	indeks	46.95
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai AKIP Bappeda	skor	87,18

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	697.456.500	Dana Keistimewaan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.014.480.000	APBD
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	793.234.900	APBD
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	450.617.100	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.606.788.819	APBD



E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP (e-gov.gunungkidulkab.go.id)



Sumber: <https://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/login>

Gambar II. 1 E-SAKIP

2. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA) (sipanda.gunungkidulkab.go.id)



Sumber: <https://sipanda.gunungkidulkab.go.id/>

Gambar II. 2 SIPANDA



3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aplikasi untuk penganggaran awal, tahap pergeseran anggaran dan perubahan anggaran perangkat daerah.



Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/auth/login>

Gambar II. 3 SIPD KEMENDAGRI

4. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Penatausahaan (SIPD) adalah aplikasi untuk keuangan dalam Penyusunan angkas, pengajuan keuangan dan laporan keuangan perangkat daerah.



Sumber : <https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/dashboard>

Gambar II. 4 SIPD Penatausahaan



5. Instrumen internal Bappeda Kabupaten Gunungkidul dalam pengawasan penggunaan ruang rapat, kendaraan, bbm dan laporan ATK serta dokumen kepegawaian tersusun dalam aplikasi DIOS.



Gambar II. 5 Aplikasi DIOS

6. Aplikasi *e-planning* / *e-musren* adalah aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan data kependudukan, sarana prasana kependudukan, kalender pembangunan dan informasi pembangunan.

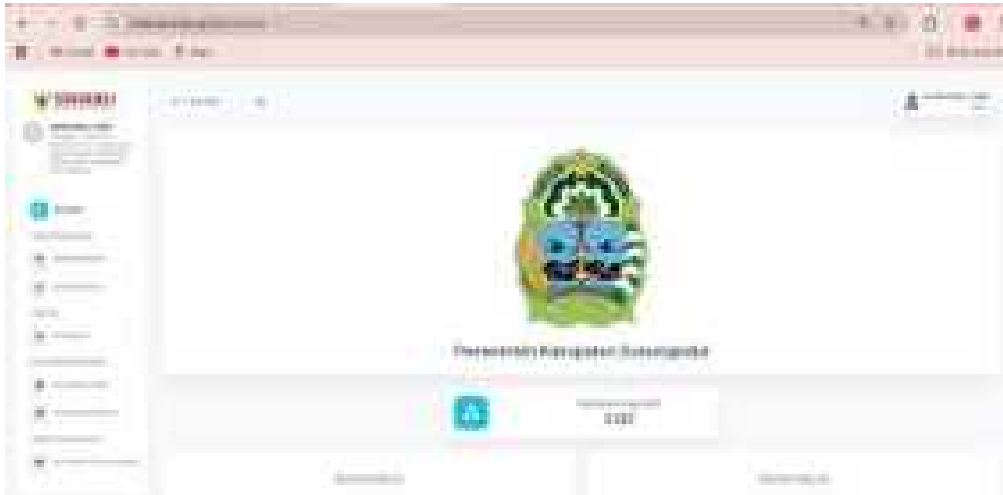


Gambar II. 6 Aplikasi E - Musren

7. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), aplikasi yang digunakan untuk pengawasan kearsipan. Penandatanganan



surat/dokumen, pendisposisian wewenang, dan Penyusunan naskah masuk/keluar.



Sumber : <https://srikandi.arsip.go.id/auth/login>

Gambar II. 7 Aplikasi SRIKANDI

8. Aplikasi APIK dan mobsi adalah aplikasi kepegawaian yang memuat menu layanan untuk pegawai yang terdiri dari data pegawai, buku kerja, presensi, kartu identitas dan satya lancana.



Gambar II. 8 Aplikasi APIK dan Mobsi



9. Aplikasi SINOMAN (Sistem Informasi Pangripta Keistimewaan) yaitu aplikasi yang digunakan untuk menyusun rencana usulan kegiatan maupun anggaran melalui dana keistimewaan.



Sumber : <https://sinoman.gunungkidulkab.go.id/>

Gambar II. 9 Aplikasi SINOMAN



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Efisiensi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Bappeda Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi	Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan	Skor	25,86	25,57	27,20	25,57*)	94,00	Sangat Tinggi	94,00

**LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pembangunan daerah yang akuntabel serta inovasi daerah yang berkualitas	Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026	Indeks	3717	46,60	4457 (46,95)	52,75	112,35	Sangat Tinggi	112,35
1.1	Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	persen	98,23	97,74	100	97,82	97,82	Sangat Tinggi	97,82
1.2	Meningkatnya implementasi inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	indeks	54,24	46,60	46,95	52,75	112,35	Sangat Tinggi	112,35
1.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai AKIP Bappeda	skor	83,45	86,80	87,18	86,80*)	99,56	Sangat Tinggi	99,56

*) Nilai AKIP Komponen Perencanaan dan Nilai Akip Bappeda Tahun t-1

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tujuan : Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang akuntabel serta inovasi daerah yang berkualitas

Tujuan Bappeda diukur dengan dua indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan dan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026. Dengan target Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan sebesar 27,20 Dengan capaian di tahun 2025 sebesar 25,57*), maka tujuan sudah tercapai 94,00 persen. Dan target indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026 sebesar 46,95 dengan realisasi di tahun 2025 sebesar 52,75, maka tujuan sudah tercapai 112,35 persen.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Gunungkidul tidak hanya berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target akhir Renstra 2026, pada beberapa indikator strategis bahkan telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan.



Berdasarkan capaian indikator tujuan tersebut, terlihat bahwa kinerja perencanaan, evaluasi pembangunan, dan penguatan inovasi daerah telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan. Pencapaian tujuan ini secara langsung dipengaruhi oleh kinerja sasaran-sasaran strategis yang menjadi penjabaran operasional tujuan perangkat daerah. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor pendukung capaian tujuan serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, analisis kinerja selanjutnya difokuskan pada capaian masing-masing sasaran strategis.

Sasaran 1: Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan unsur pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan. Sesuai dengan tugas tersebut, Bappeda berusaha melaksanakan fungsinya dengan maksimal untuk mewujudkan sasaran strategis Bappeda yaitu Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan.

Pencapaian target sasaran ini, berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tanggal 5 Mei 2025, diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi	Menunjukkan rerata persentase kesesuaian program dalam : 1. RKPD terhadap RPJMD; 2. APBD terhadap RKPD;



No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
	daerah	pembangunan daerah	3. Renja PD terhadap Renstra PD; 4. APBD terhadap Renja PD; dan 5. Capaian evaluasi pembangunan daerah dari masing-masing program

Pada tahun 2025, realisasi pencapaian sasaran Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan meningkat menuju hasil yang positif. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah, realisasi indikator Persentase Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah mencapai 97,82 persen. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi untuk indikator sasaran pertama.

Tabel III. 4 Capaian Sasaran Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	97,82	97,82	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 97,82%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 97,82 yang mendekati dari target yang ditetapkan sebesar 100.



Realisasi kinerja sebesar 97,82 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	99,68	97,74	97,82	100	97,82

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat pada Tahun 2025. Pencapaian target sasaran Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan indikator Persentase Kesesuaian Program Keistimewaan;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Kesesuaian dan Capaian Program dalam Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Kesesuaian Program Sektoral.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana Dengan Baik	(Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten yang terlaksana/jumlah seluruh layanan yang direncanakan) x 100%
		Program Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Kesesuaian Program Keistimewaan	Rerata dari : 1. $[1 - (\text{selisih program keistimewaan dalam Renja PD dan Renstra PD}) / \text{jumlah program keistimewaan dalam } \times 100\% \text{ Renstra PD}]$ 2. $[1 - (\text{selisih program keistimewaan dalam APBD dan Renja PD}) / \text{jumlah program keistimewaan dalam Renja PD}] \times 100\%$
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian dan Capaian Program dalam Perencanaan, engendalian dan Evaluasi	Rerata dari : 1. $[1 - (\text{selisih program dalam RKPD dalam RPJMD}) \text{ dibagi program dalam RPJMD}] \times 100\%$ 2. $[1 - (\text{selisih program dalam APBD dan RKPD}) \text{ dibagi program dalam RKPD}] \times 100\%$
				(Jumlah layanan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana dibagi jumlah seluruh layanan yang direncanakan) x 100%
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program Sektoral	Rerata dari : 1. $[1 - (\text{selisih program dalam Renja PD dan Renstra PD}) \text{ dibagi jumlah } \times 100\% \text{ program dalam Renstra PD}]$ 2. $[1 - (\text{selisih program$

**LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
				dalam APBD dan Renja PD) dibagi jumlah program dalam Renja D] x 100%
				Rerata dari : 1. [1-(selisih program dalam Renja PD dan Renstra PD) dibagi jumlah x 100% program dalam Renstra PD] 2. [1-(selisih program dalam APBD dan Renja PD) dibagi jumlah program dalam Renja D] x 100%
				Rerata dari : 1. [1-(selisih program dalam Renja PD dan Renstra PD) dibagi jumlah x 100% program dalam Renstra PD] 2. [1-(selisih program dalam APBD dan Renja PD) dibagi jumlah program dalam Renja D] x 100%

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah berikut:

Tabel III. 7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kesesuaian Program
Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	97,82	Program Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Kesesuaian Program Keistimewaan	100	97,59	Sangat Tinggi
			Program Perencanaan,	Persentase Kesesuaian	100	99,39	Sangat Tinggi

**LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



			Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	dan Capaian Program dalam Perencanaan, engendalian dan Evaluasi			
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program Sektoral	100	96,48	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program					100	97,82	Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah rata-rata 97,82%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah tersebut didukung dari:

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang
 - b. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
 - Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan :
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan :



- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan :
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatan :
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)



- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp. 2.505.171.400 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 2.399.424.050 (95,78%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 105.747.350 (4,22%).

- 1) Program Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan kegiatan:
 - a) Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Pertanahan dan Tata Ruang dan sub kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 332.347.500,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 325.681.335 (97,99%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 6.666.165 (2,00%).
 - b) Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dan sub kegiatan:
 - Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 184.150.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 180.387.545,00



(97,96%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 3.762.455,00 (2,04%).

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 140.332.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 138.211.280,00 (98,49%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.120.720,00 (1,52%).

2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan:

a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan sub kegiatan:

- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 19.150.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 18.364.736,00 (95,90%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 785.264,00 (4,10%).
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 74.650.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 74.650.000,00 (100%).
- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 22.990.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 22.990.000,00 (100%).
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 656.632.500,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 654.943.541,00 (99,74%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.688.959,00 (0,25%).

b) Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sub kegiatan:

- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 69.015.000,00 dalam



realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 68.869.246,00 (99,79%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 145.754,00 (0,21%).

- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 73.760.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 62.104.194,00 (84,20%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 11.655.806,00 (15,80%).

c) Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sub kegiatan:

- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kotadengan menggunakan anggaran sebesar Rp 49.147.500,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 44.389.228,00 (90,32%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 4.758.272,00 (9,68%).
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 49.135.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 47.064.746,00 (95,79%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.070.254,00 (4,21%).

3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan:

a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia dengan sub kegiatan:

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 80.987.500,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 78.778.252,00 (97,27%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.209.248,00 (2,72%).



- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 24.800.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 22.548.583,00 (90,92%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.251.417,00 (9,07%).
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 78.585.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 77.465.644,00 (98,58%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.119.356,00 (1,42%).
- b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam) dengan sub kegiatan:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 36.307.400,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 17.551.789,00 (48,34%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 18.755.611,00 (51,65%).
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 64.640.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 61.900.038,00 (95,76%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.739.962,00 (4,24%).
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 110.220.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 109.728.496,00



(99,55%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 491.504,00 (0,45%).

c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan dengan sub kegiatan:

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 141.460.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 140.200.259,00 (99,11%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.259.741,00 (0,89%).
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 20.590.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 20.529.689,00 (99,71%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 60.311,00 (0,29%).
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 235.645.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 233.065.449,00 (98,91%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.579.551,00 (1,10%).

Faktor Penghambat Keberhasilan

Sasaran 1 Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah antara lain :

- a. Kurangnya informasi terkini mengenai dana perimbangan yang akan diterima pada awal proses perencanaan;
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk tahun perencanaan seringkali baru diterima pada saat pelaksanaan Musrenbang Nasional;



- c. Sistem Informasi perencanaan pembangunan daerah masih perlu penyempurnaan;
- d. Masih adanya persepsi yang berbeda dari perencana PD untuk menterjemahkan target sasaran dalam RPJMD kedalam program kegiatan tahunan;
- e. Regulasi atau kebijakan baru yang berkenaan dengan perencanaan atau penganggaran dari Pemerintah Pusat sering terlambat;
- f. Awal dimulainya proses perencanaan tahunan yang belum sama di tiap jenjang pemerintahan;
- g. Masih minimnya jumlah aparatur yang ditugaskan di bidang perencanaan;
- h. Proses musrenbang tingkat DIY yang panjang dan beberapa kebijakan Pemerintah DIY yang berpengaruh pada perencanaan kabupaten baru diputuskan di akhir target waktu yang telah ditetapkan.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat agar informasi transfer dana perimbangan segera didapatkan;
- b. Menyempurnakan atau melakukan kastemisasi aplikasi sistem informasi perencanaan sesuai dengan kebutuhan perencanaan di Kabupaten Gunungkidul;
- c. Melakukan pencermatan kembali terhadap jabaran program, kegiatan, dan anggaran;
- d. Memberikan masukan pada perencanaan tingkat desa dan kecamatan yang berupa indikasi sasaran, prioritas dan program prioritas kabupaten pada tahun perencanaan;
- e. Penambahan aparatur fungsional perencana;
- f. Koordinasi dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat lebih intensif sehingga sedini mungkin mendapatkan informasi kebijakan perencanaan pembangunan.



Faktor Pendukung Keberhasilan

Sasaran 1 Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam menunjang keberhasilan kegiatan program utama.
- b. Efisiensi operasi dengan menghilangkan/menggeser anggaran/kegiatan yang tidak jelas dan membutuhkan banyak sumber daya.
- c. Monitoring dan evaluasi berkala dan berkelanjutan terhadap anggarandan kegiatan.

Perbandingan capaian kinerja dengan standar atau unit organisasi lain tidak dapat dilakukan secara kuantitatif karena keterbatasan ketersediaan data kinerja yang terpublikasi dan dapat diperbandingkan secara seragam antar perangkat daerah. Meskipun demikian, penilaian kinerja tetap mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Selain realisasi kinerja yang terus meningkat tersebut juga diperlukan perbandingan dengan target nasional yaitu Kementrian PPN/Bappenas sebagai institusi penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan target nasional untuk sasaran strategis 1 Kementrian PPN/Bappenas; Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional, pada tahun 2025 menetapkan target nilai indeks 78 (Target Dalam Renstra Bappenas 2025-2029). Selaras dengan sasaran strategis 1 Kementrian PPN/Bappenas, pada Bappeda Kabupaten Gunungkidul yaitu sasaran 1 Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator sasaran adalah Persentase Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, capaian realisasi Bappeda Kabupaten Gunungkidul 97,82 sudah sebanding dengan target nasional.



Sasaran 2: Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah

Sasaran Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah diukur dengan indikator indeks inovasi daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Menunjukkan jumlah total nilai inovasi daerah yang terverifikasi berdasarkan penilaian dari Kemendagri Rumus perhitungan indikator: Jumlah total nilai inovasi daerah yang terverifikasi berdasarkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri

Penetapan target Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 menggunakan acuan capaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2018-2020 yang dihitung menggunakan acuan skor dan predikat sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

No	Interval Skor	Predikat Indeks Inovasi Daerah
1	0	Belum Mengisi Data
2	1 – 500	Kurang Inovatif
3	501 – 1.000	Inovatif
4	> 1.001	Terinovatif

Sejak tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri menetapkan perubahan parameter penilaian, sehingga metode penghitungan Indeks Inovasi Daerah tidak lagi menggunakan formulasi sebelumnya.

Pada pelaksanaan penilain tahun 2021, Kemendagri mengubah parameter isian serta skor dan kategori menjadi:



- Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari:
 - 1) 3 Variabel;
 - 2) 15 Indikator; dan
 - 3) Jumlah Skpr Maksimal SPD senilai 63 (25,20%).
- Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:
 - 1) 5 Variabel;
 - 2) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan
 - 3) Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%).

Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah :

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	60,01 - 100,00
Inovatif	35,00 - 60,00
Kurang Inovatif	0,01 - 34,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Pada tahun 2025, Bappeda Kabupaten Gunungkidul memperoleh skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 52,75 yang dihitung sesuai dengan perubahan pelaksanaan penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2021. Mengetahui capaian sasaran meningkatnya implementasi inovas daerah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel III. 9 Capaian Sasaran Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	46,95	52,75	112,35	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas target dalam renstra yang ditetapkan sebesar 4457 atau dalam penyesuaian perubahan indeks inovasi daerah Kemendagri (46,95) untuk tahun 2025 dengan realisasi capaian 112,35%.



Realisasi kinerja sebesar 52,75 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	54,67	46,60	52,75	46,95	112,35

*) hasil penyesuaian target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 46,95

Berdasarkan evaluasi data, realisasi kinerja pada tahun 2024 mengalami penurunan dan kembali menunjukkan peningkatan pada tahun 2025. Meskipun capaian tahun 2025 belum melampaui capaian tahun 2023, tren perbaikan yang terjadi menunjukkan arah pemulihan kinerja yang positif. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatkan Implementasi Inovasi Daerah ini adalah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan indikator Persentase Hasil kelitbangan yang ditindak lanjuti. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1.	Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil kelitbangan yang ditindak lanjuti	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti pada tahun t dibagi jumlah kelitbangan yang difasilitasi pada tahun (t-1) x 100% Ditindaklanjuti artinya adalah diterapkan/



NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
				diimplementasikan
				Jumlah kelitbangan dalam Renja Bappeda dibagi Jumlah kelitbangan dalam Renstra Bappeda x 100%
				Menunjukkan kumulatif jumlah kelitbangan yang dianggarkan/ dilaksanakan setiap tahun dibandingkan dengan jumlah kelitbangan yang diencankan dalam Renstra

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.12 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah berikut:

Tabel III. 12 Capaian Kinerja Program Pada Sasaran Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	112,35	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil kelitbangan yang ditindak lanjuti	46,95	52,75	100 Sangat Inovatif

Keberhasilan capaian Indikator program pada Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah tersebut didukung dari :

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Program Penelitian Dan



Pengembangan Daerah dengan Kegiatan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi, dengan sub kegiatan :

- a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
- b. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
- c. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Faktor Penghambat Keberhasilan

Sasaran 2 Meningkatkan Implementasi Inovasi Daerah antara lain :

- a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang inovasi daerah
- b. Keterbatasan sumber daya (anggaran, SDM, infrastruktur)
- c. Resistensi terhadap perubahan
- d. Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri
- e. Regulasi yang tidak mendukung

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang inovasi daerah melalui pelatihan dan sosialisasi
- b. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan
- c. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industry
- d. Pengembangan infrastruktur dan teknologi
- e. Penyederhanaan regulasi dan prosedur
- f. Peningkatan pendanaan untuk inovasi daerah
- g. Pengembangan ekosistem inovasi daerah.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Sasaran 2 Meningkatkan Implementasi Inovasi Daerah, adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :



- a. Dukungan pemerintah daerah
- b. Ketersediaan teknologi dan infrastruktur
- c. Kolaborasi dengan akademisi dan industry
- d. Masyarakat yang terbuka terhadap perubahan
- e. Pendanaan yang memadai

Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Nilai AKIP PD yang digunakan untuk capaian pada tahun N adalah nilai AKIP PD tahun N-1, sehingga untuk menghitung capaian tahun 2025 menggunakan Nilai AKIP PD tahun 2024. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Bappeda Tahun n-1. Dasar Pengukuran adalah PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal



		bobot 25%.
--	--	------------

Pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 86,80 (delapan puluh enam koma delapan puluh).

Tabel III. 14 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	87,18	86,80*)	99,56	Sangat Tinggi

*Nilai AKIP t-1 atau tahun 2024

Dari data tersebut diatas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 87,18 terealisasi 86,80 sehingga capaian kinerja sebesar 99,56%.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024, terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, dan tidak terdapat perbandingan antara realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional.

Tabel III. 15 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

NO	GAMBARAN HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	PERENCANAAN KINERJA		
	Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana	-----	NIHIL

**LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



NO	GAMBARAN HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.		
2.	PENGUKURAN KINERJA		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) belum memiliki definisi operasional dan formulasi yang memadai.	Mereviu kelengkapan komponen indikator IKU sehingga memiliki definisi operasional dan formulasi yang relevan dan mengusulkan penetapannya pada periode selanjutnya sesuai dengan tata kala perencanaan.	Definisi operasional dan formulasi dalam pengukuran kinerja yang disajikan dalam Pelaporan Kinerja 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tanggal 5 Mei 2025 Untuk pengukuran kinerja IKU pada Renstra 2025-2029 ditindaklanjuti pada penyusunan IKU Tahun 2025-2029
	PELAPORAN KINERJA		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.	-----	NIHIL
	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.	-----	NIHIL



Capaian realisasi Nilai AKIP tahun 2024 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	86.65	86.68	86.60	86.80*)	87.40	99,31

*Nilai AKIP n-1 atau tahun 2024

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Rerata capaian dari masing-masing indikator kinerja keiatan

Tabel III. 18 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	99,31	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	100	95,24	95,24 Sangat Tinggi



			Kabupaten/Kota	kabupaten terlaksana dengan baik			
--	--	--	----------------	---	--	--	--

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 95,24%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor Penghambat Keberhasilan

Sasaran 3 Akuntabilitas kinerja PD Meningkat antara lain :

- a. Recofusing/ Batasan Anggaran
- b. Keterbatasan Sumber Daya.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penyesuaian Anggaran yang ada
- b. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada

Faktor Pendukung Keberhasilan

Sasaran 3 Akuntabilitas kinerja PD Meningkat, adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :



- a. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam menunjang keberhasilan kegiatan program penunjang
- b. Koordinasi antar bidang yang baik
- c. Komitmen pegawai dalam penyelesaian pekerjaan

B. Capaian Kinerja Lainnya

1. Capaian Kinerja Pelayanan Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Bappeda mengacu pada prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan berupaya menyediakan fasilitas penunjang.

Fasilitas penunjang pelayanan disediakan dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, kemudahan layanan, serta kenyamanan masyarakat pengguna layanan. Upaya tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman, akses yang mudah, perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif, serta adanya perhatian dan perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus.

Fasilitas pendukung pelayanan yang tersedia antara lain:

- a. Ruang laktasi yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan meja kursi dan lemari pendingin untuk penyimpanan asi

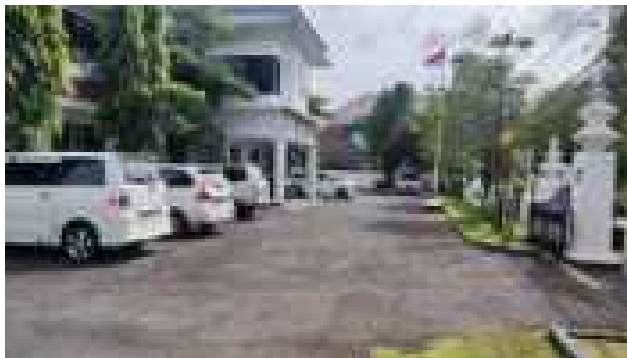




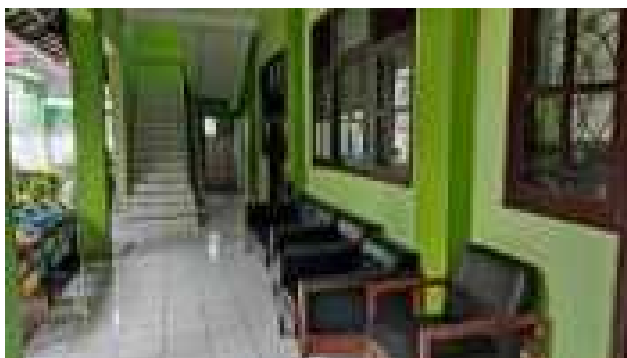
- b. Bangunan ramah disabilitas, untuk mendukung pelayanan tersebut Bappeda telah menyediakan toilet khusus dan pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat.



- c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses



- d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan





- e. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.



Untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, Bappeda secara konsisten melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahun. Pada tahun 2025, pengukuran IKM dilakukan terhadap Sembilan unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
3. Waktu penyelesaian pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompensasi pelaksanaan
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai IKM Bappeda Tahun 2025 mencapai 83,56 dengan kategori Baik. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 80,37, yang menunjukkan adanya perbaikan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.



Peningkatan nilai IKM tersebut mencerminkan bahwa upaya perbaikan pelayanan, baik dari aspek prosedur pelayanan, kejelasan informasi, maupun sikap dan responsivitas petugas, telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Hasil pengukuran IKM ini selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah perbaikan pelayanan publik Bappeda pada tahun 2026.

2. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender (PUG) di Bappeda diintegrasikan dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan, baik fisik maupun nonfisik. Implementasi PUG bertujuan memastikan agar setiap output dan outcome program bersifat responsif dan sensitif gender, dengan memperhatikan pemenuhan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi lima kelompok afirmatif gender, yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah.

Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.



Sesuai tugas dan fungsinya, Bappeda mendorong penerapan PUG melalui koordinasi lintas perangkat daerah, penguatan kapasitas perencana, serta pengintegrasian isu kesetaraan dan keadilan gender dalam penyusunan RKPD, Renja PD, dan dokumen evaluasi pembangunan. Upaya tersebut bertujuan memastikan bahwa hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang setara dan adil bagi semua kelompok masyarakat.

Sebagai implementasi dari perencanaan tersebut, Bappeda melaksanakan program-program secara inklusif dan berkeadilan gender, yang diorientasikan pada pemenuhan akses, partisipasi, dan manfaat yang setara bagi kelompok afirmatif gender. Diwujudkan melalui berbagai program antara lain :

- a. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan



dan pembangunan manusia, dengan output antara lain:

Forum Tematik Pembangunan Inklusif Disabilitas, Penanggulangan Kemiskinan, Dan Penurunan Stunting. Kegiatan yang berlangsung pada 19 November 2025, Forum tematik ini bertujuan mengintegrasikan isu-isu strategis

khususnya terkait inklusi disabilitas, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan stunting, ke dalam penyusunan Rencana Awal Renja Perangkat Daerah. Melalui forum ini, Bappeda mendorong agar seluruh perangkat daerah mampu mengakomodasi usulan melalui musrenbang di tingkat kalurahan dan kapanewon, sekaligus memastikan program dan kegiatan daerah lebih responsif terhadap kelompok rentan. Diantaranya



tentang aksesibilitas dalam gedung perkantoran; ketersediaan lapangan pekerjaan; bantuan modal bagi penyandang disabilitas.

- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan output antara lain:



Musrenbang RKPD Tahun 2025 dan RPJPD Tahun 2025-2045 Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan yang berlangsung pada 26 Maret 2024, kegiatan ini diharapkan

penyusunan RKPD dan RPJPD dapat mewujudkan keselarasan dokumen Nasional, Provinsi, dan Daerah dimana tahun 2025 merupakan tahun awal dari RPJPD. Keselarasan dokumen Perencanaan salah satunya diwujudkan dengan Indikator Visi, dan Indikator Utama Pembangunan Dimana indikator dan target Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan hasil kesepakatan dengan Bappeda DIY. Berdasarkan hasil forum maka diperlukan kebijakan perencanaan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tercapainya Indikator Utama Pembangunan sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas ekonomi lokal menuju global dengan dukungan para pemangku kepentingan untuk mencapai masyarakat bermartabat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak



langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan media sosial dan website untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
2. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul :
 - a. Aplikasi SiPANDA
 - b. Aplikasi SINOMAN
 - c. Aplikasi DIOS
 - d. Aplikasi e-plan/e-musren

C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.3/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 02 September 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp 7.609.952.619,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp 7.017.680.937,00 atau 92,22%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 592.271.682,00

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel 3.13 berikut:

Tabel III. 19 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	656.829.500,00	644.280.160,00	97,59	12.549.340,00	1,91
1)	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan	332.347.500,00	325.681.335,00	97,99	6.666.165,00	2,01

**LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
	Pertanahan dan Tata Ruang					
2)	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	324.482.000,00	318.598.825,00	98,19	5.883.175,00	1,81
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.694.791.119,00	4.172.435.120,00	95,24	522.355.999,00	11,13
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.296.500,00	51.099.846,00	97,71	1.196.654,00	2,29
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.592.980.546,00	3.227.896.028,00	89,84	365.084.518,00	10,16
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.333.260,00	18.400.012,00	38,87	28.933.248,00	61,13
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.827.865,00	206.427.134,00	75,11	68.400.731,00	24,89
5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.300.000,00	8.299.999,00	100,00	1,00	0,00
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.045.038,00	193.288.584,00	86,66	29.756.454,00	13,34
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	496.007.910,00	467.023.517,00	94,16	28.984.393,00	5,84
4.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.014.480.000,00	993.375.691,00	98,50	21.104.309,00	2,08
1)	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	773.422.500,00	770.948.277,00	99,68	2.474.223,00	0,32
2)	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	142.775.000,00	130.973.440,00	91,73	11.801.560,00	8,27
3)	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	98.282.500,00	91.453.974,00	93,05	6.828.526,00	6,95
5.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	793.234.900,00	761.768.199,00	96,48	31.466.701,00	3,97

**LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1)	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	184.372.500,00	178.792.479,00	96,97	5.580.021,00	3,03
2)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	211.167.400,00	189.180.323,00	89,59	21.987.077,00	10,41
3)	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	397.695.000,00	393.795.397,00	99,02	3.899.603,00	0,98
6.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	450.617.100,00	445.821.767,00	86,71	4.795.333,00	1,06
1)	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	450.617.100,00	445.821.767,00	98,94	4.795.333,00	1,06
	Jumlah Keseluruhan	7.609.952.619,00	7.017.680.937,00	92,22	592.271.682,00	0,08

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Keuangan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 20 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Rp	%
1.	Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	97,52	97,52	2.464.544.400	2.399.424.050	97,35	65.120.350	2,64
2.	Meningkatnya implementasi inovasi daerah	46,95	52,75	112,35	450.617.100	445.821.767	98,94	4.795.333	1,06
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	87,18	86,80*)	99,56	4.694.791.119	4.172.435.120	88,87	522.355.999	11,12
Jumlah Belanja Total					7.609.952.619	7.017.680.937	92,22	592.271.682	7,79
Jumlah Belanja Program Utama					2.915.161.500	2.845.245.817	97,60	69.915.683	2,39
Jumlah Belanja Program Penunjang					4.694.791.119	4.172.435.120	88,87	522.355.999	11,12

Sumber Data : Subbagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

*) Nilai LKjIP tahun 2025



Berdasarkan tabel III.15 di atas capaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul belum mencapai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp 7.609.952.619 terealisasi Rp 7.017.680.937 atau 92,22% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 592.271.682 atau 7,79% yang bersumber dari:

1. Tidak terserapnya anggaran diklat/kursus, anggaran gaji dan sub kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan
2. Sisa honorarium untuk tenaga ahli karena menyesuaikan spesifikasinya, honor THL, serta honor reviewer yang tidak perlu dikeluarkan karena sudah ada pendampingan PIC DIY dari BRIN
3. Sisa anggaran dikarenakan sisa dari sppd (tiket pesawat dan hotel yang menyesuaikan harga market)



BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bappeda pada tahun 2025 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Bappeda untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan.



Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan.

Pertama, walaupun IKU telah tercapai dengan kategori sangat tinggi, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Mengupayakan penetapan target kinerja yang dituangkan dalam dokumen perencanaan lebih tepat sehingga realisasi target bisa tercapai dan tepat waktu.
2. Meningkatkan koordinasi internal dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja.



3. Mendorong setiap unit kerja dapat memahami dan peduli atas pengukuran kinerja secara aktif dan update dalam pengukuran capaian kinerja pada aplikasi yang ada. Diharapkan dengan pengumpulan kinerja secara berkala/real time sehingga dapat dijadikan masukan untuk pimpinan dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivasi, dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan peran serta ASN dan masyarakat dalam pengembangan inovasi daerah.
5. Mempublikasikan kegiatan dan dokumen yang telah disusun ke dalam website instansi.
6. Melakukan inovasi terus menerus pada sistem perencanaan dan pengendalian yang telah ada di Bappeda untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta untuk mencapai target kinerja sasaran perangkat daerah.
7. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar perangkat daerah lainnya dan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota lainnya.



LAMPIRAN

1. *Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta perubahannya*
2. *Evaluasi AKIP Tahun 2024*
3. *Tanggapan/ Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024*
4. *SOP Pengumpulan Data Kinerja*
5. *Berita Acara Evaluasi Capaian*
6. *SK Kemendagri Tentang Indeks Inovasi Daerah*
7. *SK Tentang Meta Data IKU*
8. *Rakor Capaian Kinerja*
9. *Rakor Koordinasi Pengendalian*
10. *Rakor Pembahasan Indikator Renstra*



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memajukan Masyarakat dan Mengembangkan Wilayah

Jalan Sabra 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 391751, Faksimile: (0274) 391701
Email: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari,
Pihak Kesatu,

Pihak Kedua

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH


MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP, M.Si

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Menunjukkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang akurat sesuai inovasi daerah yang berkualitas	Nilai ADP Daerah komponen perencanaan	skor	25,47
		Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025	Indeks	40,95

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kecapaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kecapaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	persen	100
2	Meningkatnya implementasi inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	40,95
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai ADP Bappeda	skor	95,80

PROGRAM	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pemerintahan dan Kelangkaan	Rp 819.076.000,00	Cara keistimewaan
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 598.344.500,00	APBD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 844.992.900,00	APBD
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 629.277.100,00	APBD
5. Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Rp 4.812.887.165,00	APBD





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 381761, Faksimile: (0274) 381701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **HADI HENDRO PRAYOGA.**
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
- Nama : **MOHAMAD ARIF ALDIAN.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut
Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

MOHAMAD ARIF ALDIAN.

Wonosari,
Pihak Kesatu,

HADI HENDRO PRAYOGA.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah kabupaten dengan baik	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100
1.1	Tersusunnya dokumen perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Bappeda yang tersusun	Jenis	15
1.2	Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah laporan keuangan tersusun	Dokumen	14
1.3	Tertfasilitasinya kebutuhan kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	48
1.4	Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	Layanan	7
1.5	Tersedianya layanan pengadaan barang milik daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia	Layanan	2
1.6	Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	Layanan	3
1.7	Tersedianya layanan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	Layanan	5

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 4.812.867.166,00	APBD
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 56.241.500,00	APBD
1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.603.297.092,00	APBD
1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 48.353.280,00	APBD
1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 359.322.365,00	APBD
1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 8.300.000,00	APBD
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 223.045.038,00	APBD
1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 514.307.910,00	APBD



Wonosari,
 Pihak Kesatu,

HADI HENDRO PRAYOGA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦨꦧꦨꦥꦼꦫꦤꦁꦧꦨꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦨꦧꦨꦥꦼꦫꦤꦁ

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KHRISNAWATI NURYANTARI.**
Jabatan : Kepala Subbagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **HADI HENDRO PRAYOGA.**
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HADI HENDRO PRAYOGA.

Wonosari,

Pihak Kesatu,

KHRISNAWATI NURYANTARI.

LAMPIRAN PERJALUAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SABARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4
2	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	4
3	Terpenuhinya kebutuhan pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	2
4	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12
5	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12
6	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12
7	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	5
8	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	247
9	Terfasilitasinya kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	10
10	Terseleenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12
11	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1
12	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4
13	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	72
14	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	18
15	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	unit	364
16	Terpeliharanya mebel kantor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	13
17	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	43
18	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2
19	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	23

SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.353.000,00	APBD
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 23.053.260,00	APBD
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 25.300.000,00	APBD
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 6.168.885,00	APBD
5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 77.343.500,00	APBD
6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 2.580.000,00	APBD
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 8.231.200,00	APBD
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 1.200.000,00	APBD
9. Fasilitas Kunjungan tamu	Rp. 12.440.000,00	APBD

10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	251.502.000,00	APSD
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	8.300.000,00	APSD
12	Penyediaan Jasa Buntal Menyurat	Rp	800.000,00	APSD
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	120.748.508,00	APSD
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	101.488.530,00	APSD
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pengiran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	293.824.000,00	APSD
16	Pemeliharaan Mebel	Rp	1.040.000,00	APSD
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	14.900.000,00	APSD
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	191.943.910,00	APSD
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	12.600.000,00	APSD

Wonsari,

Phak Kesatu,



KRISNAWATI NURYANTARI

Phak Ketua,



HADI HENDRO PRAYOGA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391701, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KRISWANTI.

Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HADI HENDRO PRAYOGA.

Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut
Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HADI HENDRO PRAYOGA.

Wonosari,

Pihak Kesatu,

KRISWANTI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terfasilitasinya Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	674
2	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1
3	Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	13

SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.568.237.192,00	APBD
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 1.154.900,00	APBD
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Rp 339.050.000,00	APBD

Pihak Kedua,

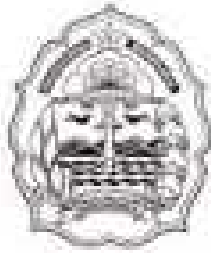


HADI HENDRO PRAYOGA

Wonosari,
Pihak Kesatu,



KRISWANTI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULITA SAVITRI,
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Ketua Tim Kerja Perencanaan
Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HADI HENDRO PRAYOGA,
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut
Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HADI HENDRO PRAYOGA,

Wonosari,
Pihak Kesatu,

YULITA SAVITRI,

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PERENCANAAN SEKRETARIAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tersusunnya Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4
2	Tersusunnya RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1
3	Tersusunnya Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1
4	Tersusunnya DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	2
5	Tersusunnya Perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	2
6	Terlapornya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	17
7	Tertelaksananya Forum Perangkat Daerah tertuang dalam berita acara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1

SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)		KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	41.830.000,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	513.000,00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Rp	405.000,00	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	750.500,00	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	Rp	640.000,00	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	1.745.000,00	APBD
7	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	Rp	9.025.000,00	APBD

Pihak Kedua,



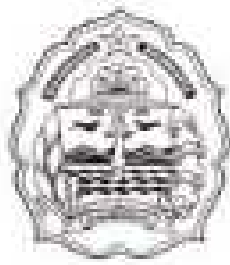
HADI HENDRO PRAYOGA

Wonosari,

Pihak Kesatu,



YULITA SAVITRI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701
Email: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **AGUS SUGIARTO.**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
- Nama : **MOHAMAD ARIF ALDIAN.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut
Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari,
Pihak Kesatu.


MOHAMAD ARIF ALDIAN.


AGUS SUGIARTO.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERENCANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian program keistimewaan	Persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan yang tersusun	Jenis	2
2	Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Persen	100
2.1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	Jenis	4
2.2	Terlaksananya analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah jenis kesepakatan koordinasi penyusunan profil dan informasi pembangunan	Jenis	2

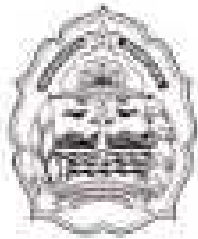
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 295.800.000,00	Dana Keistimewaan
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rp 295.800.000,00	Dana Keistimewaan
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 891.782.000,00	APBD
2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 745.757.000,00	APBD
2.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 146.025.000,00	APBD



MOHAMAD ARIF ALDIAN.

Wonosari,
Pihak Kesatu,


AGUS SUGIARTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FERIKA PUJIHARINI**
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **AGUS SUGIARTO**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


AGUS SUGIARTO

Wonosari,
Pihak Kesatu


FERIKA PUJIHARINI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terkumpulnya Berita Acara Musrenbang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	berita acara	1
2	Terverifikasinya Usulan dari Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	usulan	18
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	11

SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	0	APBD
2 Penyisipan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	0	APBD
3 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	0	APBD

Pihak Kedua,


AGUS SUJIARTO

Wonosari,
Pihak Kesatu,


FERIKA PUJIHARINI



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIFAI ADI HARTANTO.**

Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data
Pembangunan Bidang Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **AGUS SUGIARTO.**

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut
Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Wonosari,

Pihak Kesatu,


AGUS SUGIARTO.


RIFAI ADI HARTANTO.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terselenggaranya Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dokumen	3
2	Diterbitkannya Buku Profil Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	buku	2

SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	0	APBO
2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	0	APBO

Pihak Kedua,


AGUS SUGIARTO

Wonosari,
Pihak Kesatu,


RIFAI ADI HARTANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701
Email: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YADIANTO ANGGORO.**
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Rencana Pembangunan Wilayah Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **AGUS SUGIARTO.**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


AGUS SUGIARTO.

Wonosari,
Pihak Kesatu,


YADIANTO ANGGORO.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	dokumen	2
2	Terlaksananya Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	dokumen	4

SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	0	APBD
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	0	Dana Keistimewaan

Pihak Kedua,


AGUS SUGIARTO

Wonosari,
Pihak Kesatu,


YADIANTO ANGGORO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD FAJAR NUGROHO.**
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **MOHAMAD ARIF ALDIAN.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut
Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari,

Pihak Kesatu,



MOHAMAD ARIF ALDIAN.

MUHAMMAD FAJAR NUGROHO.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tertaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelengkapan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian program keistimewaan	Persen	100
1.1	Tertaksananya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan yang tersusun	Jenis	2
2	Tertaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program sektoral	Persen	100
2.1	Tertaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang tersusun	Jenis	3

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelengkapan dan Ketatalaksanaan	Rp 348.037.500,00	Dana Keistimewaan
1.1 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp 348.037.500,00	Dana Keistimewaan
2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 460.845.000,00	APBD
2.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	Rp 460.845.000,00	APBD



MOHAMAD ARIF ALDIAN

Wondori,
Pihak Kesatu.

MUHAMMAD FAJAR NUGROHO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappedada@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **JADI MARKUAT.**
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Infrastruktur Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
- Nama : **MUHAMMAD FAJAR NUGROHO.**
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut
Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUHAMMAD FAJAR NUGROHO.

Wonosari,

Pihak Kesatu,

JADI MARKUAT.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA INFRASTRUKTUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	5

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	APBD

Pihak Kedua,



MUHAMMAD FAJAR NUGROHO

Wonosari,
Pihak Pertama,



JADI MARKUAT



OCTAVIANTA RAHARJA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PERTANAHAN, TATA RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tertaksananya Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	dokumen	2
2	Tertaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	5

SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	0	Dana Keistimewaan
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	APBD

Pihak Kedua,



MUHAMMAD FAJAR NUGROHO

Wonosari,

Pihak Kesatu,



OCTAVIANTA RAHARJA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 381761, Faksimile: (0274) 381701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FRANSISKHA NURJUNI F.**
Jabatan : Pengelola Bahan Perencana Ketua Tim Kerja Komunikasi, Informatika, dan Kebencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **MUHAMMAD FAJAR NUGROHO.**
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUHAMMAD FAJAR NUGROHO.

Wonosari,

Pihak Kesatu,

FRANSISKHA NURJUNI F.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**PENGELOLA BAHAN PERENCANA KETUA TIM KERJA KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN KEBENCANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan	6

SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	0	APBD

Pihak Kedua,

Wonosari,
Pihak Kesatu,



MUHAMMAD FAJAR NUGROHO



FRANSISKHA NURJUNI F



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701
Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **SUGENG PRIHARTANTO.**
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
- Nama : **MOHAMAD ARIF ALDIAN.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari,
Pihak Kesatu,


SUGENG PRIHARTANTO.

Pihak Kedua,

MOHAMAD ARIF ALDIAN.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tertaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan	Persentase kesesuaian program sektoral	persen	100
1.1	Tertaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan bidang perekonomian yang tersusun	Jenis	3

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 134.850.400,00	APBD
1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 134.850.400,00	APBD


 MOHAMAD ARIF ALDIAN.

Wonosari,
 Pihak Kasatu,


 SUGENG PRIHARTANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Jalan Setra 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel:bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RENOVA CIPTO ANGGORO.**
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Pertanian, Perikanan, dan Kelautan Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **SUGENG PRIHARTANTO.**
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUGENG PRIHARTANTO

Wonosari,

Pihak Kesatu,

RENOVA CIPTO ANGGORO

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PERTANIAN, PERIKANAN,
DAN KELAUTAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tertaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	5

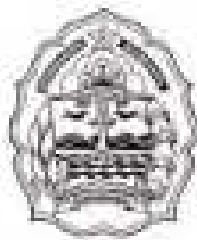
SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	APBD

Phak Kedua,


SUGENG PRIHARTANTO

Wonosari,
Pihak Kesatu,


RENOVA CIPTO ANGGORO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Sabra 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ESKA NUGRAHINI MURNIATI.**
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Industri dan Jasa
Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **SUGENG PRIHARTANTO.**
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan
Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut
Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Wonosari,

Pihak Kesatu,


| **SUGENG PRIHARTANTO.**


ESKA NUGRAHINI MURNIATI.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA INDUSTRI DAN JASA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tertelaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	5

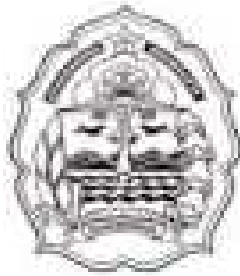
SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	APBD

Pihak Kedua,


SUGENG PRIHARTANTO

Wonosari,
Pihak Kesatu,


ESKA NUGRAHINI MURNIATI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Sabra 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701
Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUNG WAHYU DEWANTI.
Jabatan : Analis Perencana Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUGENG PRIHARTANTO.
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang sehanusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUGENG PRIHARTANTO.

Wonosari,

Pihak Kesatu,

AGUNG WAHYU DEWANTI.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS PERENCANA KETUA TIM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	laporan	6

SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	0	APBD

Pihak Kedua,


SUGENG PRIHARTANTO

Wonosari,
 Pihak Kesatu,


AGUNG WAHYU DEWANTI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701
Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **ASIH WULANDARI.**
Jabatan : Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
- Nama : **MOHAMAD ARIF ALDIAN.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut
Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



MOHAMAD ARIF ALDIAN.

Wonosari,
Pihak Kesatu,

ASIH WULANDARI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG RISET, INOVASI DAERAH, DAN PENGENDALIAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tertaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian program keistimewaan	Persen	100
1.1	Tertaksananya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan yang tersusun	Jenis	2
2	Tertaksananya Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Persen	100
2.1	Tertaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Jumlah jenis laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun	Jenis	2
3	Tertaksananya Hasil Kelitbangan yang Dapat Dilanjutkan	Persentase hasil kelitbangan yang dilanjutkan: jumlah kelitbangan yang tersusun	Persen	85,71
3.1	Tertaksananya Kegiatan Kelitbangan	Jumlah jenis kelitbangan yang terlaksana	Buah	3

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 175.239.000,00	Dana Keistimewaan
1.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Rp 175.239.000,00	Dana Keistimewaan
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 107.562.500,00	APBD
2.1	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 107.562.500,00	APBD
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 529.277.100,00	APBD
3.1	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp 529.277.100,00	APBD



Wonosari, 3 Januari 2025
 Pihak Kesatu,

ASIH WULANDARI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JALMA WINARTA MULYA SABDA.**
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Penelitian dan Pengembangan Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **ASIH WULANDARI.**
Jabatan : Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, ..

ASIH WULANDARI

Wonosari,

Pihak Kesatu,

JALMA WINARTA MULYA SABDA.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dokumen	4
2	Terlaksananya Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	laporan	2
3	Terselenggaranya Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	laporan	2

SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0	APBD
2	Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	0	APBD
3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0	APBD

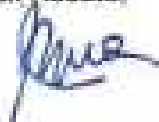
Pihak Kedua:



ASH WULANDARI

Wonosari,

Pihak Kesatu,



JALMA WINARTA MULYA SABDA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701
Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FX PAMENANG SETYADARMA.**
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Pelaporan Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **ASIH WULANDARI.**
Jabatan : Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ASIH WULANDARI.

Wonosari,

Pihak Kesatu,

FX PAMENANG SETYADARMA.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PELAPORAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-Diy	laporan	8
2	Terkordinirnya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	13

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-Diy	0	Dana Keistimewaan
2	Kordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	0	APBD

Pihak Kedua,



ASH WULANDARI

Wonorejo,

Pihak Ketiga,



FX. PAMENANG SETYADARMA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MURDIYANA.**
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Evaluasi Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **ASIH WULANDARI.**
Jabatan : Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ASIH WULANDARI.

Wonosari,

Pihak Kesatu,

MURDIYANA.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	9

SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0	APBD

Pihak Kedua,

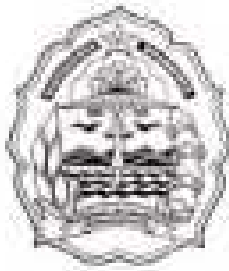


ASIH WULANDARI

Wonosari,
Pihak Kesatu,



MURDIYANA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KARTINI**
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **MOHAMAD ARIF ALDIAN**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



MOHAMAD ARIF ALDIAN

Wonosari,
Pihak Kesatu,

KARTINI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tertaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program sektoral	Persen	100
1.1	Tertaksananya Koordianasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah jenis kesepakatan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang tersusun	Jenis	3

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	249.297.500	APBD
1.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	249.297.500	APBD



Wonosari,
 Pihak Kesatu,

KARTINI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satia 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 391701, Faksimile: (0274) 391701
Email: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **ARI NUR AIDA.**
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Pemerintahan Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
- Nama : **KARTINI.**
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


KARTINI.

Wonosari,
Pihak Kesatu,


ARI NUR AIDA.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PEMERINTAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	5

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	APBD

Pihak Kedua,

KARTINI

Wonosari,
Pihak Kesatu,

ARI NUR AIDA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391781, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR SAMSU.**

Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **KARTINI.**

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KARTINI.

Wonosari,

Pihak Kesatu,

NUR SAMSU.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	4

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	APBD

Pihak Kedua,

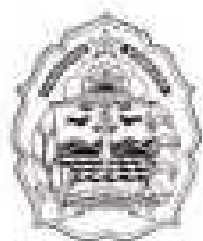


KARTINI

Wonosari,
Pihak Kesatu,



NUR SAMSU



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bappeda Gunungkidul

Jalan Setra 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 381701, Faksimile: (0274) 381701
Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITY HIDAYATI.**
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Kesehatan dan Sosial
Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **KARTINI.**
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut
Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KARTINI.

Wonosari,

Pihak Kesatu,

SITY HIDAYATI.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA KESEHATAN DAN SOSIAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	laporan	4

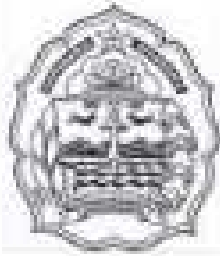
	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	APBD

Pihak Kedua,

KARTINI

Wonosari,
Pihak Kesatu,

SITY HIDAYATI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦒꦤꦶꦥꦠꦺꦤꦥꦼꦫꦺꦤꦁꦏꦺꦴꦧꦤꦸꦤꦠꦤꦼꦫꦤ

Jalan Setris 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391791, Faksimili: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda-gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP, M.Si

Jabatan: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E., M.P.

Jabatan: Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu

MOHAMAD ARIF ALDIAN

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

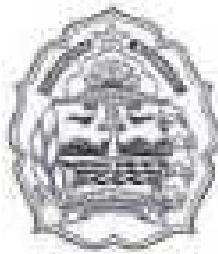
NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang akuntabel serta inovasi daerah yang berkualitas	Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan	skor	25,47
		Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025	Indeks	46,95

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	persen	100
2	Meningkatnya implementasi inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	46,95
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai AKIP Bappeda	skor	87,18

PROGRAM	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1. Program Penguatan dan Koordinasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Rp. 887.455.900,00	Dana Kelembagaan
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.214.450.000,00	APBC-P
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 783.234.800,00	APBC-P
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 455.517.100,00	APBC-P
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 6.000.728.819,00	APBC-P


 Kepala Daerah
ENDAH SUPRIATNA LINTARANINGSIH


 Wana, 10 September 2025
 Kepala Bappeda
MUHAMMAD ARIF ALDIAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦑꦸꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦧꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦁꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦧꦼꦩꦼꦂꦶꦠ

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391781, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HADI HENDRO PRAYOGA, S.IP
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MOHAMAD ARIF ALDIAN

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,


HADI HENDRO PRAYOGA

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah kabupaten dengan baik	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100
1.1	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Bappeda	Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Bappeda yang tersusun	Jenis	15
1.2	Tersusunnya laporan keuangan Bappeda	Jumlah laporan keuangan tersusun	Dokumen	14
1.3	Terfasilitasinya kebutuhan kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	48
1.4	Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	Layanan	7
1.5	Tersedianya layanan pengadaan barang milik daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia	Layanan	1
1.6	Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	Layanan	3
1.7	Tersedianya layanan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	Layanan	5

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 6.606.788.615,90	APBD-P
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 52.298.500,00	APBD-P
1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.504.973.546,00	APBD-P
1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 47.333.260,00	APBD-P
1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 270.832.685,00	APBD-P
1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 8.300.000,00	APBD-P
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 223.045.036,00	APBD-P
1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 500.007.910,00	APBD-P


 Pihak Kedua,

MOHAMAD ARIF ALDIAN

Wonorejo, 4 September 2025
 Pihak Pertama,

HADI HENDRO PRAYOGA

YULITA SAVITRI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PERENCANAAN SEKRETARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	BASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tersusunnya Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4
2	Tersusunnya RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1
3	Tersusunnya Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1
4	Tersusunnya DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	2
5	Tersusunnya Perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	2
6	Terlapornya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	17
7	Terdakseranya Forum Perangkat Daerah tertuang dalam berita acara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1

SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)		KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	41.035.000,00	APBD-P
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	513.000,00	APBD-P
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	405.000,00	APBD-P
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	760.500,00	APBD-P
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp	640.000,00	APBD-P
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	1.745.000,00	APBD-P
7	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	5.875.000,00	APBD-P

Plhak Kedua,

HADI HENDRO PRAYOGA

Wonosari, 4 September 2025

Plhak Kasatu,

YULITA SAVITRI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦒꦤꦼꦥꦼꦫꦤꦤꦼꦧꦁꦸꦤꦤꦼꦢꦤꦼꦫ

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHRISNAWATI NURYANTARI, A.Md
Jabatan : Kepala Subbagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HADI HENDRO PRAYOGA, S.IP
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HADI HENDRO PRAYOGA

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,

KHRISNAWATI NURYANTARI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SABARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terdapatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4
2	Terlaksananya Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	4
3	Terperuhnya kebutuhan pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	3
4	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	13
5	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12
6	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	13
7	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	5
8	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan dan serundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	247
9	Terdapatnya kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	10
10	Terdolnggarannya rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12
11	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1
12	Terlaksananya penyediaan jasa surti menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surti Menyurat	laporan	4
13	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	72
14	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	16
15	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dihayatiak Pajak dan Partisipasinya	unit	364
16	Terpeliharanya mebel kantor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	13
17	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	43
18	Terlaksananya pemeliharaan/keabsahan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3
19	Terlaksananya pemeliharaan/keabsahan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	22

SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.933.000,00	APSD-P
2 Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 22.033.200,00	APSD-P
3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 25.300.000,00	APSD-P
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 12.188.166,00	APSD-P
5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 114.325.200,00	APSD-P
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 2.360.300,00	APSD-P
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 8.111.300,00	APSD-P
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 1.200.000,00	APSD-P
9 Fasilitas Kunjungan tamu	Rp 12.440.000,00	APSD-P

10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koneksi SKPD	Rp. 120.331.500,00	APSD-P
11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 8.300.300,00	APSD-P
12. Penyediaan Jasa Rutel Menyurat	Rp. 800.500,00	APSD-P
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 120.746.500,00	APSD-P
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 101.468.500,00	APSD-P
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlakuan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 264.024.000,00	APSD-P
16. Pemeliharaan Mobil	Rp. 1.540.500,00	APSD-P
17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 14.900.000,00	APSD-P
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 183.443.310,00	APSD-P
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 8.630.000,00	APSD-P

Pihak Ketua,



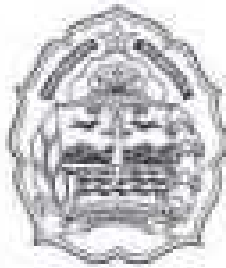
HADI HENDRO PRAYOGA

Winnasari, 4 September 2023

Pihak Kasub,



KRISNAWATI NURYANTARI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 381781, Faksimile: (0274) 381701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KRISWANTI, S.E

Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HADI HENDRO PRAYOGA, S.IP

Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

HADI HENDRO PRAYOGA

KRISWANTI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terfasilitasinya Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	698
2	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1
3	Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	13

SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.470.234.346,00	APBD-P
2 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 821.200,00	APBD-P
3 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Rp 33.918.000,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,

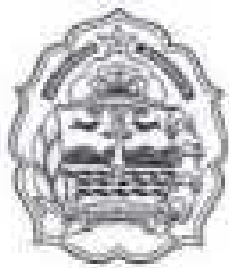


HADI HENDRO PRAYOGA

Pihak Kesatu,



KRISWANTI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391781, Faksimila: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS SUGIARTO, S.IP., M.IP

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.SI

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

MOHAMAD ARIF ALDIAN


AGUS SUGIARTO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERENCANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelambagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian program keistimewaan	Persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan yang tersusun	Jenis	2
2	Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Persen	100
2.1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	Jenis	4
2.2	Terlaksananya analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah jenis kesepakatan koordinasi penyusunan profil dan informasi pembangunan	Jenis	2

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelambagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 209.850.000,00	Dana Keistimewaan
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rp 209.850.000,00	Dana Keistimewaan
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 916.197.500,00	APBD-P
2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 773.422.500,00	APBD-P
2.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 142.775.000,00	APBD-P


 Pihak Kedua,

MOHAMAD ARIF ALDIAN

Wonorejo, 4 September 2025
 Pihak Pertama,


AGUS SUGIARTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦒꦤꦶꦥꦤꦺꦴꦤꦏꦤꦧꦺꦴꦤꦁꦢꦺꦴꦫꦃ

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391781, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIFAI ADI HARTANTO, S.Si., M.Si
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data
Pembangunan Bidang Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUGIARTO, S.IP., M.IP
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


AGUS SUGIARTO

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,


RIFAI ADI HARTANTO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terselenggaranya Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dokumen	3
2	Diterbitkannya Buku Profil Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	buku	2

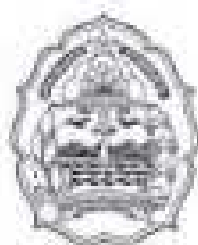
SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	0	APBD-P
2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	0	APBD-P

Pihak Kedua,


AGUS SUGIARTO

Wonosari, 4 September 2025
 Pihak Pertama,


RIFAI ADI HARTANTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ଆମ ଲୋକ ସିଂହାଳ ଲୋକ ଭେଦ ବିଚାରକୁ ନୁହଁନ୍ତି ।

Jalan Setra 3, Wonorejo, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Poserbappeda.gurungidukab.go.id Laman: bappeda.gurungidukab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERIKA PUJIHARINI, S.Si., M.Ed.Dev
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUGIARTO, S.IP., M.IP
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pinak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pinak Kudus

Pihak Kesatu

AGUS SUGIARTO

FERIKA PULIHARINI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

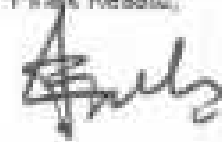
NO	BASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terkumpulnya Berita Acara Musrenbang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	berita acara	1
2	Terverifikasi Usulan dari Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	usulan	18
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	10

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	0	APBD-P
2	Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	0	APBD-P
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	0	APBD-P

Pihak Kedua,


AGUS SUGIARTO

Wonorejo, 4 September 2025
 Pihak Pertama,


FERIKA PUJIHARINI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦧꦢꦤꦥꦼꦂꦺꦤꦒꦤꦤꦥꦼꦧꦁꦸꦤꦢꦤꦼꦫꦃ

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YADIANTO ANGGORO, A.Md
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Rencana
Pembangunan Wilayah Bidang Perencanaan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUGIARTO, S.IP., M.IP
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,


AGUS SUGIARTO


YADIANTO ANGGORO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	dokumen	2
2	Tertaksananya Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	dokumen	4

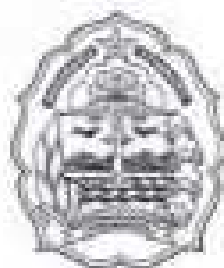
SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	0	APBD-P
2 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	0	Dana Keistimewaan

Phak Kedua,


AGUS SUGARTO

Wonosari, 4 September 2025
 Pihak Kesatu,


YADIANTO ANGGORO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦑꦸꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Email: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAJAR NUGROHO, S.T., M.I.P

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.I.P., M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

MOHAMAD ARIF ALDIAN



MUHAMMAD FAJAR NUGROHO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian program keistimewaan	Persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan yang tersusun	Jenis	2
2	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program sektoral	Persen	100
2.1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang tersusun	Jenis	3

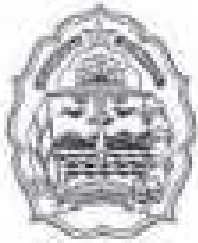
PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 332.347.500,00	Dana Keistimewaan
1.1 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp 332.347.500,00	Dana Keistimewaan
2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 397.695.000,00	APBD-P
2.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	Rp 397.695.000,00	APBD-P


 Pihak Kedua,

MOHAMAD ARIF ALDIAN

Wonorejo, 4 September 2025
 Pihak Ketiga,


MUHAMMAD FAJAR NUGROHO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦨꦫꦤꦥꦼꦂꦺꦤꦁꦤꦤꦥꦼꦧꦁꦸꦤꦢꦤꦼꦫꦃ

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391781, Faksimile: (0274) 391701

Posel:bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JADI MARKUAT, A.Md
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Infrastruktur Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MUHAMMAD FAJAR NUGROHO, S.T., M.IP
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUHAMMAD FAJAR NUGROHO

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,

JADI MARKUAT

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA INFRASTRUKTUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	4

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	APBD-P

Pihak Kedua,

MUHAMMAD FAJAR NUGROHO

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,

JADI MARKLIAT



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OCTAVIANTA RAHARJA, S.T.
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Pertanahan, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MUHAMMAD FAJAR NUGROHO, S.T., M.IP
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUHAMMAD FAJAR NUGROHO

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,

OCTAVIANTA RAHARJA

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PERTANAHAN, TATA RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			BATUAN	JUMLAH
1	Tertelaksananya Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun	dokumen	2
2	Tertelaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	5

SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	0	Dana Keistimewaan
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	APED-P

Pihak Kedua,

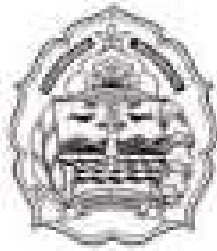


MUHAMMAD FAJAR NUGROHO

Wonosari, 4 September 2025
 Pihak Kedua,



OCTAVIANTA RAHARJA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦫꦤꦥꦼꦫꦺꦤꦁꦤꦤꦶꦧꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGENG PRIHARTANTO, S.IP
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

MOHAMAD ARIF ALDIAN


SUGENG PRIHARTANTO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah kabupaten dengan baik	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	19,79
1.1	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Bappeda	Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Bappeda yang tersusun	Jenis	6
1.2	Tersusunnya laporan keuangan Bappeda	Jumlah laporan keuangan tersusun	Dokumen	3
1.3	Terfasilitasinya kebutuhan kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	49
1.4	Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	Layanan	6
1.5	Tersedianya layanan pengadaan barang milik daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia	Layanan	0
1.6	Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	Layanan	3
1.7	Tersedianya layanan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	Layanan	4

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 3.477.361.968,00	APBD-P
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 13.710.423,00	APBD-P
1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.935.220.201,00	APBD-P
1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 32.935.877,00	APBD-P
1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 151.357.664,00	APBD-P
1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1,00	APBD-P
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 107.079.547,00	APBD-P
1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 237.068.245,00	APBD-P

Pihak Kedua,



MOHAMAD ARIF ALDIAN

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Pertama,



SUGENG PRIHARTANTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHRISNAWATI NURYANTARI, A.Md

Jabatan : Kepala Subbagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUGENG PRIHARTANTO, S.IP

Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

SUGENG PRIHARTANTO

KHRISNAWATI NURYANTARI

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tertapanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4
2	Tertakutannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	4
3	Terpenuhiya kebutuhan pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	3
4	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	13
5	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12
6	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12
7	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	9
8	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	242
9	Tertafelitasnya kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	10
10	Terdolenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12
11	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1
12	Tertakutannya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4
13	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	72
14	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	16
15	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	unit	364
16	Terpeliharanya mebel kantor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	13
17	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	43
18	Tertakutannya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2
19	Tertakutannya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	22

SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.333.000,00	APBD-P
2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 22.033.260,00	APBD-P
3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 25.300.000,00	APBD-P
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 12.185.165,00	APBD-P
5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 114.325.200,00	APBD-P
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 2.350.000,00	APBD-P
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 6.111.300,00	APBD-P
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 1.200.000,00	APBD-P

9	Facilitas Kunjungan tamu	Rp	12.440.000,00	APBD-P
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	120.221.000,00	APBD-P
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	8.300.000,00	APBD-P
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	800.000,00	APBD-P
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	120.746.508,00	APBD-P
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	101.498.530,00	APBD-P
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peningkatan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	294.024.000,00	APBD-P
16	Pemeliharaan Mebel	Rp	1.040.000,00	APBD-P
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	14.900.000,00	APBD-P
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	183.443.910,00	APBD-P
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	5.500.000,00	APBD-P

Pihak Kedua,


SUGENG PRIHARTANTO

Woroseni, October 2025

Pihak Kedua,


KHRISHAWATI MURYANTARI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULITA SAVITRI, S.E
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Ketua Tim Kerja Perencanaan
Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUGENG PRIHARTANTO, S.IP
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

SUGENG PRIHARTANTO

YULITA SAVITRI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PERENCANAAN SEKRETARIAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tersusunnya Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4
2	Tersusunnya RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1
3	Tersusunnya Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1
4	Tersusunnya DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	2
5	Tersusunnya Perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	2
6	Terlapornya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	17
7	Tertelaksananya Forum Perangkat Daerah tertuang dalam berita acara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1

SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)		KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	41.035.000,00	APBD-P
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	513.000,00	APBD-P
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	405.000,00	APBD-P
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	750.500,00	APBD-P
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp	640.000,00	APBD-P
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	1.745.000,00	APBD-P
7	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	5.875.000,00	APBD-P

Pihak Kedua,


SUGENG PRIHARTANTO

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kesatu,


YULITA SAVITRI



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

ꦑꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦧꦤ꧀ꦥꦼꦫꦺꦤꦁꦤ꧀ꦥꦼꦧꦁꦸꦤꦢꦤꦼꦫꦤ

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701
Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KRISWANTI, S.E
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUGENG PRIHARTANTO, S.IP
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,

SUGENG PRIHARTANTO

KRISWANTI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terfasilitasinya Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	685
2	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1
3	Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	13

SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.470.234.345,00	APBD-P
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 821.200,00	APBD-P
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 33.918.000,00	APBD-P

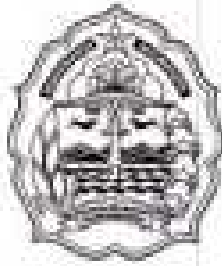
Pihak Kedua,


SUGENG PRIHARTANTO

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kesatu,


KRISWANTI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OCTAVIANTA RAHARJA, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,



MOHAMAD ARIF ALDIAN



OCTAVIANTA RAHARJA

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tertaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian program keistimewaan	Person	100
1.1	Tertaksananya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan yang tersusun	Jenis	2
2	Tertaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program sektoral	Person	100
2.1	Tertaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang tersusun	Jenis	2

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)		KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp	59.196.392,00	Dana Keistimewaan
1.1	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp	59.196.392,00	Dana Keistimewaan
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	117.465.600,00	APBD-P
2.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	Rp	117.465.600,00	APBD-P


 Pihak Kedua

MOHAMAD ARIF ALDIAN

Wonosari, October 2025
 Pihak Kesatu

OCTAVIANTA RAHARJA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 381751, Faksimila: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UTIYA CHUSNA SITAPRPTIMI, S.P.W.K
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan Ketua Tim Kerja Infrastruktur
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : OCTAVIANTA RAHARJA, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

OCTAVIANTA RAHARJA, S.T

UTIYA CHUSNA SITAPRPTIMI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN KETUA TIM KERJA INFRASTRUKTUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	0

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	APSD-P

Pihak Kedua,



OCTAVIANTA RAHARJA

Wonosari, October 2025

Pihak Kesatu,



UTIYA CHUSNA SITAPRAPTIWI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRANSISKHA NURJUNI FADILAH, S.T
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan Ketua Tim Kerja Pertanahan, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : OCTAVIANTA RAHARJA, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

OCTAVIANTA RAHARJA, S.T

FRANSISKHA NURJUNI FADILAH

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN KETUA TIM KERJA PERTANAHAN, TATA RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun	dokumen	0
2	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	2

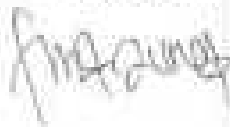
SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	0	Dana Keistimewaan
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	APBD-P

Pihak Kedua,



OCTAVIANTA RAHARJA

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,



FRANSISKHA NURJUNI FADILAH



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gunungkidul

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUNG MURDANI, S.T

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan Ketua Tim Kerja Komunikasi, Informatika, dan Kebencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : OCTAVIANTA RAHARJA, S.T

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

OCTAVIANTA RAHARJA

AGUNG MURDANI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN KETUA TIM KERJA KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN KEBENCANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan	2

SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	0	APBD-P

Pihak Kedua,



OCTAVIANTA RAHARJA

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,



AGUNG MURDANI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ESKA NUGRAHINI MURNIATI, S.E., M.Ec.Dev
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan
Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,


MOHAMAD ARIF ALDIAN



ESKA NUGRAHINI MURNIATI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tertaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program sektoral	persen	100
1.1	Tertaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan bidang perekonomian yang tersusun	Jenis	3

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 129.394.497,00	APBD-P
1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 129.394.497,00	APBD-P


Pinak Kedua,

MOHAMAD ARIF ALDIAN

Wonosari, Oktober 2025
Pinak Kesatu,



ESKA NUGRAHINI MURNIATI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Setra 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimil: (0274) 391701

Posel: bappeta@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENOVA CIPTO ANGGORO, S.TP

Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Pertanian, Perikanan, dan Kelautan Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ESKA NUGRAHINI MURNIATI, S.E., M.Ec.Dev

Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

ESKA NUGRAHINI MURNIATI

RENOVA CIPTO ANGGORO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PERTANIAN, PERIKANAN,
DAN KELAUTAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tertaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	6

SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	APBD-P

Pihak Kedua,

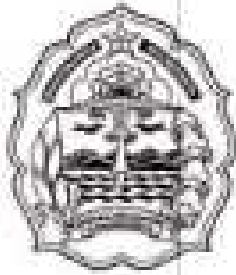


ESKA NUGRAHINI MURNIATI

Wonorejo, Oktober 2025
Pihak Kesatu,



RENOVA CIPTO ANGGORO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Gunung Kidul

Jalan Satris 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUNG WAHYU DEWANTI, S.P, MPA
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ESKA NUGRAHINI MURNIATI, S.E., M.Ec.Dev
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

ESKA NUGRAHINI MURNIATI

AGUNG WAHYU DEWANTI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBLIJAKAN TIM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tertaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	laporan	5

SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	0	APBD-P

Pihak Kedua,



ESKA NUGRAHINI MURNIATI

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,



AGUNG WAHYU DEWANTI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

[illegible]

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telefon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidul.go.id, Laman: bappeda.gunungkidul.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIA NOVIANA, S.E

Jabatan	Penelaah Teknis Kebijakan Ketua Tim Kerja Industri dan Jasa Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
---------	--

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ESKA NUGRAHINI MURNIATI, S.E., M.Ec.Dev

Jabatan	: Kepala Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
---------	---

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

ESKA NUGRAHINI MURNIATI



LIA NOVIANA

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN KETUA TIM KERJA INDUSTRI DAN JASA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tertelaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	1

SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	APBD-P

Pihak Kedua,



ESKA NUGRAHINI MURNIATI

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,



LIA NOVIANA

RIFA ADI HARTANTO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG RISET, INOVASI DAERAH, DAN PENGENDALIAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian program keistimewaan	Persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan yang tersusun	Jenis	2
2	Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Persen	100
2.1	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Jumlah jenis laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun	Jenis	2
3	Terlaksananya Hasil Kelitbangan yang Dapat Ditindaklanjuti	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti: jumlah kelitbangan yang tersusun	Persen	85.71
3.1	Terlaksananya Kegiatan Kelitbangan	Jumlah jenis kelitbangan yang terlaksana	Buah	3

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 78.958.520,00	Dana Keistimewaan
1.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Rp 78.958.520,00	Dana Keistimewaan
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 427.173.542,00	APBD-P
2.1	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 427.173.542,00	APBD-P
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 213.586.771,00	APBD-P
3.1	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp 213.586.771,00	APBD-P


Pihak Kedua,

MOHAMAD ARIF ALDIAN

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Ketiga,

RIFAI ADI HARTANTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satya 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FX PAMENANG SETYADARMA, S.T., M.Si
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Pelaporan Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : RIFAI ADI HARTANTO, S.Si., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

RIFAI ADI HARTANTO

FX PAMENANG SETYADARMA

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PELAPORAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-Diy	laporan	8
2	Terkoordinirnya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	9

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	0	Dana Keistimewaan
2 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	0	APBD-P

Pihak Kedua


RIFAI ADI HARTANTO

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu


FX. PAMENANG SETYADARMA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦑꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦒꦤꦼꦥꦼꦫꦤꦤꦼꦧꦁꦸꦤꦤꦼꦢꦤꦼꦫ

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391751, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURDIYANA, S.E

Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Evaluasi Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : RIFAI ADI HARTANTO, S.Si., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

RIFA'I ADI HARTANTO

MURDIYANA

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	9

SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0	APBD-P

Pihak Kedua,

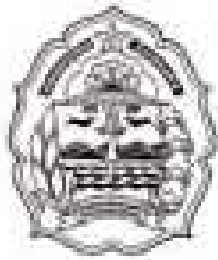


RIFAI ADI HARTANTO

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,



MURDIYANA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦑꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦶꦥꦠꦺꦤ꧀ꦥꦼꦫꦺꦤꦁꦏꦸꦭꦤꦼꦧꦁꦸꦤꦤꦼꦢꦁ

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Poselbappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JALMA WINARTA MULYA SABDA, S.P
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Penelitian dan Pengembangan Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : RIFAI ADI HARTANTO, S.Si., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

RIFAI ADI HARTANTO

JALMA WINARTA MULYA SABDA

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tertaksananya Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dokumen	3
2	Tertaksananya Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	laporan	2
3	Terselenggaranya Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	laporan	2

SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1 Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0	APBD-P
2 Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	0	APBD-P
3 Soslalisasi dan Dieseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0	APBD-P

Pihak Kedua



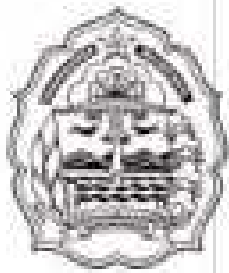
RIFAI ADI HARTANTO

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kesatu



JALMA WINARTA MULYA SABDA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satra 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARI NUR AIDA, S.IP., M.E
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


MOHAMAD ARIF ALDIAN

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,

ARI NUR AIDA

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program sektoral	Persen	100
1.1	Terlaksananya Koordianasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah jenis kesepakatan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang tersusun	Jenis	3

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	60.558.948	APBD-P
1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	60.558.948	APBD-P

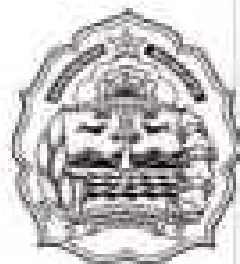

Pihak Kedua,

MOHAMAD ARIF ALDIAN

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,



ARI NUR AIDA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR SAMSU, S.Pd., M.Pd

Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ARI NUR AIDA, S.IP., M.E

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua,

ARI NUR AIDA

Pihak Kesatu,

NUR SAMSU

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	4

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	APBD-P

Pihak Kedua,



ARI NUR AIDA

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Pertama,



NUR SAMSU



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦒꦤꦼꦥꦼꦫꦤꦤꦼꦧꦤꦸꦁꦤꦼꦩꦧꦸꦁꦤꦼꦢꦤꦼꦫ

Jalan Satia 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRASTYA VIGA MUTIARA, S.Sos
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan Ketua Tim Kerja Pemerintahan
Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ARI NUR AIDA, S.IP., M.E
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

ARI NUR AIDA

TRASTYA VIGA MUTIARA

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN KETUA TIM KERJA PEMERINTAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	1

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	APSD-P

Pihak Kedua,

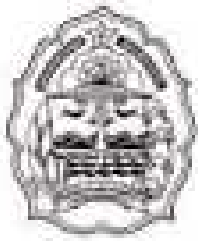


ARI NUR AIDA

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,



TRASTYA VIGA MUTIARA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Selira 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391781, Faksimile: (0274) 391701

Email: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITY HIDAYATI, SKM., M.M
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Kesehatan dan Sosial
Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ARI NUR AIDA, S.IP., M.E
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

ARI NUR AIDA

SITY HIDAYATI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA KESEHATAN DAN SOSIAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Tertelaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	laporan	3

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	APBD-P

Pihak Kedua,



ARI NUR AIDA

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kesatu,



SITY HIDAYATI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Selira 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701
Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERIKA PUJIHARINI, S.Si., M.Ec.Dev
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MOHAMAD ARIF ALDIAN

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,

FERIKA PUJIHARINI

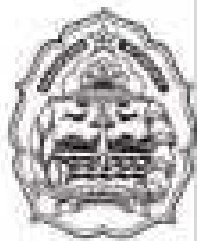
LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERENCANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian program keistimewaan	Persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan yang tersusun	Jenis	2
2	Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Persen	100
2.1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	Jenis	4
2.2	Terlaksananya analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah jenis kesepakatan koordinasi penyusunan profil dan informasi pembangunan	Jenis	2

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)		KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp	89.508.665,00	Dana Keistimewaan
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rp	89.508.665,00	Dana Keistimewaan
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	117.482.601,00	APBD-P
2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp	34.711.738,00	APBD-P
2.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	82.750.865,00	APBD-P


Mohamad Arif Aldian

Wonorejo, Oktober 2025
Feriha Pujiharini



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦨꦶꦥꦺꦫꦤꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦨꦶꦥꦺꦫꦤꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEPTIYAN FENDHI PRAMUKTYO, A.Md

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi Ketua Tim Kerja Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : FERIKA PUJIHARINI, S.Si, M.Es.Dev

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua,

FERIKA PUJIHARINI

Pihak Kesatu,

SEPTIYAN FENDHI PRAMUKTYO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI KETUA TIM KERJA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terkumpulnya Berita Acara Musrenbang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	berita acara	0
2	Terverifikasinya Usulan dari Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	usulan	0
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	0

SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	0	APBD-P
2	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	0	APBD-P
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	0	APBD-P

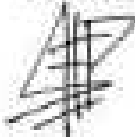
Pihak Kedua,



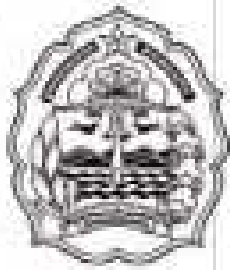
FERIKA PUJIHARINI

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kesatu,



SEPTIYAN FENDHI PRAMUKTYO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Jalan Satia 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 381751, Faksimile: (0274) 381701
Posel bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAGAS WIRANATA, S.M
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data Pembangunan Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : FERIKA PUJIHARINI, S.Si., M.Ec.Dev
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

FERIKA PUJIHARINI

BAGAS WIRANATA

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN KETUA TIM KERJA PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Terselenggaranya Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dokumen	2
2	Diterbitkannya Buku Profil Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	buku	1

SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	0	APBD-P
2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	0	APBD-P

Pihak Kedua,



FERIKA PUJIHARINI

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,



BAGAS WIRANATA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YADIANTO ANGGORO, A.Md
Jabatan : Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja Rencana
Pembangunan Wilayah Bidang Perencanaan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : FERIKA PUJIHARINI, S.Si., M.Ec.Dev
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

FERIKA PUJIHARINI

YADIANTO ANGGORO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA KETUA TIM KERJA RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	dokumen	2
2	Terlaksananya Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	dokumen	4

SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	0	APBD-P
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	0	Dana Keistimewaan

Pihak Kedua,



FERIKA PUJIHARINI

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Ketiga,



YADIANTO ANGGORO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦤꦶꦏꦠꦺꦴꦢꦶꦫ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel: inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 26 Maret 2025

Nomor : 700-1-27 /Ev-LKj/12
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Internal pada
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2024

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Nomor 164/KPTS/2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 000.8.7.3/33/2025, serta Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/ITDA-Ev.LKj/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 18 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

- a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja

Predikat	Interpretasi
	baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

serta mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian penugasan Urusan Keistimewaan.

7. **Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**
Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Nomor 700.1.2.7/SKIP/30 tanggal 17 Juli 2024, Bappeda telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal Tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan bahwa nilai sebesar 86,80 (delapan puluh enam koma delapan nol) dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" yaitu terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	27,32	27,33
2. Pengukuran Kinerja	30	25	25,07
3. Pelaporan Kinerja	15	12,94	13,05
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,42	21,35
Nilai Hasil Evaluasi	100	86,68	86,80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) belum memiliki definisi operasional dan formulasi yang memadai.

3. Pelaporan Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi.

2. Pengukuran Kinerja

Mereviu kelengkapan komponen indikator IKU sehingga memiliki definisi operasional dan formulasi yang relevan dan mengusulkan penetapannya pada periode selanjutnya sesuai dengan tata kala perencanaan

3. Pelaporan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tidak terdapat rekomendasi.

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.

 **Septiyo, S.Sos, M.Si.**
Kasubina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.



Wongsoar, N April 2025

Nomor : B.000.0.6/175/2025
Sifat : Biasa
Lampiran: 2 lembar
Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP
Bappeda Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024.

Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul

di
WONOSARI

Dalam rangka menindaklanjuti surat Inspektur Daerah Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/12 tanggal 26 Maret 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, dengan ini kami kirimkan rencana tindak lanjut sebagaimana terlampir.

Demikian atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Perencanaan
Pengembangan Daerah



Tembusan

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT (AKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

NO	GAMBARAN HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	PERENCANAAN KINERJA		
	Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.		NIHIL
2.	PENGUKURAN KINERJA		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja yaitu	Merevisi kelengkapan komponen indikator IKU sehingga memiliki definisi operasional dan formulasi yang relevan dan mengusulkan penerapannya pada periode selanjutnya sesuai dengan tata	Akan ditindaklanjuti pada penyusunan IKU Tahun 2025 - 2029

NO	GAMBARAN HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	Indikator Kinerja Utama (IKU) belum memiliki definisi operasional dan formulasi yang memadai.	kala perencanaan.	
	PELAPORAN KINERJA		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.	—————	NIHIL
	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.	—————	NIHIL

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kabupaten Gunungkidul,


Mohamad Ayif Aldian S.IP,MSi
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.197502221993111001



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunungkidul*

Jalan Satrio 3, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Laman bappeda.gunungkidulkab.go.id, Posel bappeda@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR 016/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
GUNUNGKIDUL**

**NOMOR 036/KPTS/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa data kinerja hasil pembangunan harus dikelola dan
diolah dengan baik guna memberikan informasi yang
komprehensif kepada masyarakat;
b. bahwa agar pengumpulan data kinerja dapat lebih berdaya
guna dan berhasil guna, perlu disusun Standar
Operasional Prosedur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunungkidul tentang Standar Operasional
Prosedur Pengumpulan Data Kinerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 17 Mei 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



MOHAMAD ARIF ALDIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
NOMOR 016/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 036/KPTS/2020 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN
DATA KINERJA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2024
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon: (0274) 391761, Faksimili: (0274) 391701



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TIM KERJA PERENCANAAN

NOMOR SOP	: B/000-B.3/317/2024
TGL PEMBUATAN	: 30 JUNI 2020
TGL REVISI	: 17 MEI 2024
TGL PENETAPAN	: 17 MEI 2024
DITETAPKAN OLEH	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul,  MOHAMAD ARIF ALDIAN
NAMA SOP	PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021; 4. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.	1. Memahami teknik pengolahan data kinerja 2. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
KETERANGAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP LKJIP PD 2. SOP Pengumpulan Bahan Penyusunan LKJIP 3. SOP AP Pengurusan Surat Keluar	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. Blanko/formulir pengumpulan data 4. Komputer 5. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Ketidakkakuratan data yang dilaporkan dan keterlambatan penyampaian laporannya dapat mempengaruhi kinerja perangkat daerah dan pemerintah daerah.	1. Memeriksa sumber data dan tanggal pemutakhiran data. 2. Menyusun konsep laporan data kinerja sesuai format yang telah ditentukan.

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA							MUTU BAKU			
		Kepala Perangkat Daerah	Sekretaris Perangkat Daerah	Ketua Tim Kerja Perencanaan/ yang membidangi pelaporan kinerja	Kepala Bidang (Atasan pelaksana teknis kegiatan)	Pelaksana teknis kegiatan/ (sumber data)	Analisis/ Pengolah Data/ Pengadministrasian (Pelaksana Teknis)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1.	Memugaskan Sekretaris untuk mengumpulkan data kinerja perangkat daerah (triwulan/ semester/ akhir tahun)								Disponisi/ surat permintaan data	5 menit	Disponisi	
2.	Mengkoordinasikan Kepala Bidang untuk pengumpulan data kinerja (triwulan/ semester/ akhir tahun)								Disponisi	1,5 jam	Kesepakatan rapat	
3.	Mengadakan rapat koordinasi pengumpulan data kinerja (triwulan/ semester/ akhir tahun) bersama semua pelaksana teknis kegiatan dan Ketua Tim Kerja Perencanaan/ yang membidangi pelaporan kinerja								Disponisi	1 jam	Kesepakatan rapat	
4.	Memugaskan bawahan (Analisis/ Pengolah data/ Pengadministrasian) untuk mengumpulkan data kinerja (triwulan/ semester/ akhir tahun) di lingkup tugasnya								Kesepakatan hasil rapat/ Disponisi	15 menit	Disponisi	
5.	Mengumpulkan data kinerja (triwulan/ semester/ akhir tahun) dan mengirimkan kepada atasan untuk diverifikasi								Disponisi/ instrumen pengumpulan data kinerja	1 minggu	Data kinerja masing-masing bidang	

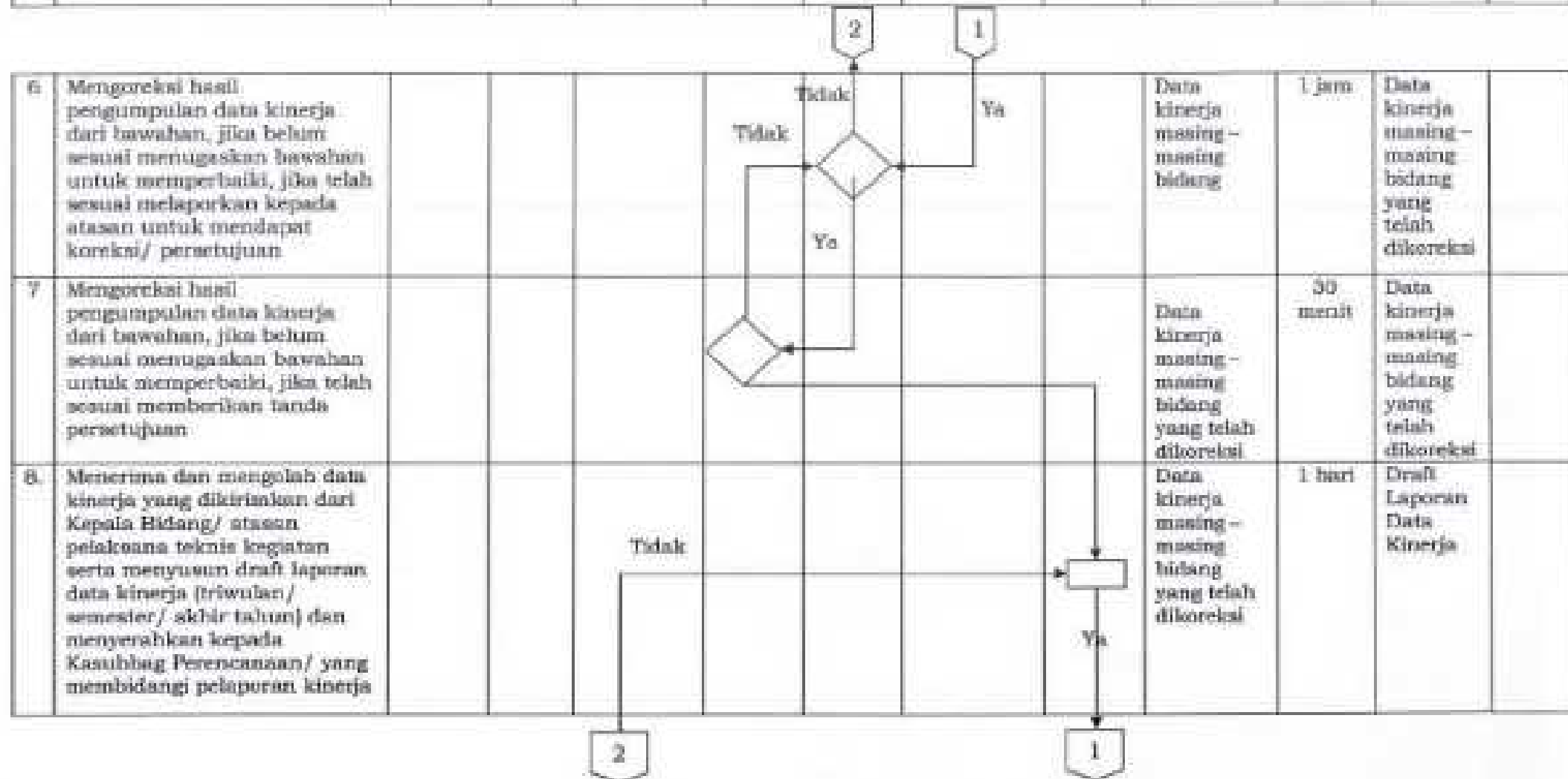
Tidak

Ya

2

1

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Kepala Perangkat Daerah	Sekretaris Perangkat Daerah	Ketua Tim Kerja Perencanaan/ yang membidangi pelaporan kinerja	Kepala Bidang (Atasan pelaksana teknis kegiatan)	Pelaksana teknis kegiatan/ (sumber data)	Analisa/ Pengolah Data/ Penged- ministrasi (Pelaksana Teknis)	Analisa Perencana- nnn, Evaluasi dan Pelaporan	Persyaratan	Waktu	Output



No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA							MUTU BAKU			
		Kepala Perangkat Daerah	Sekretaris Perangkat Daerah	Ketua Tim Kerja Perencanaan/ yang membidangi pelaporan kinerja	Kepala Bidang (Atasan pelaksana teknis kegiatan)	Pelaksana teknis kegiatan/ (sumber data)	Analisis/ Pengolah Data/ Penged- mian/ (Pelaksana Teknis)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Persyaratan	Waktu	Output	Ket

9	Mencermati dan mengoreksi draft laporan data kinerja, jika belum sesuai mengembalikan kepada Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk diperbaiki, jika telah sesuai memberikan tanda persetujuan dan menyampaikan kepada Sekretariat perangkat daerah untuk dikoreksi dan mendapat persetujuan	<pre>graph TD; D1{ } -- Ya --> C1((1)); D1 -- Tidak --> D2{ }; D2 -- Ya --> C1; D2 -- Tidak --> C2((2));</pre>							Draft laporan data kinerja	1 Jam	Draft laporan data kinerja yang telah dikoreksi	
10	Mencermati dan mengoreksi draft laporan data kinerja, jika belum sesuai mengembalikan kepada Tim Kerja Perencanaan/ yang membidangi pelaporan kinerja untuk diperbaiki, jika telah sesuai memberikan tanda persetujuan dan menyampaikan kepada kepala perangkat daerah untuk dikoreksi dan mendapat persetujuan	<pre>graph TD; D3{ } -- Ya --> C3((1)); D3 -- Tidak --> C4((2));</pre>							Draft laporan data kinerja yang telah dikoreksi bawahan	1 Jam	Draft laporan data kinerja yang telah dikoreksi	

O M	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Kepala Perangkat Daerah	Sekretaris Perangkat Daerah	Ketua Tim Kerja Perencanaan/ yang membidangi pelaporan kinerja	Kepala Bidang (Atasan pelaksana teknis kegiatan)	Pelaksana teknis kegiatan/ (sumber data)	Analisa/ Pengolah Data/ Pengad- ministrasi (Pelaksana Teknis)	Analisa Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Persetujuan	Waktu	Output

11	Mencerminati dan mengoreksi draft laporan data kinerja, jika belum sesuai mengembalikan kepada sekretaris untuk diperbaiki, jika sudah sesuai memberikan tanda tangan persetujuan	2 Tidak Ya							Draft laporan data kinerja yang telah dikoreksi dibawah	30 menit	Laporan data kinerja yang telah ditanda tangani	
12	Menyimpan atau mengirimkan laporan data kinerja ke instansi yang berwenang.								Laporan data kinerja	1 hari	Pengiriman laporan	SOP pengurusan surat keluar

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,


MOHAMAD ARIF ALDIAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bappeda Kabupaten Gunungkidul

Jl. Satria No.3, Wonosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta (55612)

Telepon : (0274) 391761, Faksimile : (0274) 391701

Laman : bappeda.gunungkidulkab.go.id, Pos-el : bappeda@gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 000.7.2.4/1201/2025

Pada hari ini Jumat tanggal sebelas bulan april tahun dua ribu dua puluh lima, kami masing-masing:

1. Nama : MURDIYANA, SE
NIP : 196905311991031003
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Tim Kerja Pengendalian dan Evaluasi
Alamat : Bappeda Kabupaten Gunungkidul
yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Nama : YULITA SAVITRI, SE
NIP : 198007112010012003
Pangkat/Gol : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Tim Kerja Perencanaan
Alamat : Bappeda Kabupaten Gunungkidul
yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan Desk Evaluasi Capaian Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan I Tahun 2025 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Pagu RPJMD Periode 2021-2026 Rp 45.922.222.838,00
- b. Capaian RKPD sampai dengan Tahun 2024 Rp 26.990.969.638,00
- c. Pagu Anggaran RKPD Tahun 2025 sebesar Rp 7.436.748.865,00
- d. Capaian kinerja RKPD sebesar 42,27%
- e. Capaian keuangan RKPD sebesar 17,57% atau Rp 1.306.466.034,00
- f. Capaian kinerja RPJMD sebesar 79,45%
- g. Capaian keuangan RPJMD sebesar 61,62% atau Rp 28.297.436.572,00
- h. Rincian capaian kinerja dan keuangan RKPD dan RPJMD terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

YULITA SAVITRI, SE
Penata Tk. I, III/d
NIP. 198007112010012003

Dibuat di : Wonosari
Pihak Kesatu

MURDIYANA, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 196905311991031003

Mengetahui/Mengesahkan
Kepala Bappeda

MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197502221993111001

[illegible]

[illegible]

Date	Project Name/Project Description/Project Location/Project Type	Project Manager/Project Lead/Project Officer/Project Coordinator	Project Status/Project Phase/Project Milestone/Project Activity	Project Budget/Project Cost/Project Expense/Project Income		Project Financial Performance								Project Financial Performance				Project Risk/Project Issue/Project Problem/Project Challenge	Project Impact/Project Benefit/Project Outcome/Project Result	Project Status/Project Phase/Project Milestone/Project Activity																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Project Financial Performance				Project Financial Performance																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						1	2	3	4	5	6	7	8								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01/01/2020	Project A: New Product Development	John Doe	Phase 1: Research & Development	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,00

John Doe
Project Manager
01/01/2020

John Doe
Project Manager
01/01/2020



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Satria No.3, Wonosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta (55812)
Telepon : (0274) 391761, Faksimile : (0274) 391701

Laman : bappeda.gunungkidulkab.go.id, Pos-el : bappeda@gunungkidulkab.go.id,

BERITA ACARA

Nomor : 000.7.2.4/ /2025

Pada hari ini Jumat tanggal sebelas bulan juli tahun dua ribu dua puluh lima, kami masing-masing:

1. Nama : MURDIYANA, SE
NIP : 196905311991031003
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Evaluasi
Alamat : Bappeda Kabupaten Gunungkidul
yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Nama : YULITA SAVITRI, SE
NIP : 198007112010012003
Pangkat/Gol : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Ketua Tim Kerja Perencanaan
Alamat : Bappeda Kabupaten Gunungkidul
yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan Desk Evaluasi Capaian Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2025 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Pagu RPJMD Periode 2021-2028 Rp 45.922.222.838,00
- b. Capaian RKPD sampai dengan Tahun 2024 Rp 26.990.969.538,00
- c. Pagu Anggaran RKPD Tahun 2025 sebesar Rp 7.436.748.865,00
- d. Capaian kinerja RKPD sebesar 50,94%
- e. Capaian keuangan RKPD sebesar 40,62% atau Rp 3.020.480.172,00
- f. Capaian kinerja RPJMD sebesar 97,85%
- g. Capaian keuangan RPJMD sebesar 65,35% atau Rp 30.011.449.710,00
- h. Rincian capaian kinerja dan keuangan RKPD dan RPJMD terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

YULITA SAVITRI, SE
Penata Tk. I, III/d
NIP. 198007112010012003

Dibuat di : Wonosari
Pihak Kesatu

MURDIYANA, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 196905311991031003

Mengetahui/Mengesahkan
Kepala Bappeda

MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197502221993111001

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.
Published by John Wiley & Sons, Inc., New York, New York

[illegible]

[illegible]

No.	Nama Instansi Kantor/Instansi Kantor/Instansi	Alamat Kantor/Instansi Kantor/Instansi	Jumlah Anak/Anak Kantor/Instansi Kantor/Instansi	Jumlah Anak/Anak Kantor/Instansi Kantor/Instansi	Jumlah Anak/Anak Kantor/Instansi Kantor/Instansi								Jumlah Anak/Anak Kantor/Instansi Kantor/Instansi								Jumlah Anak/Anak Kantor/Instansi Kantor/Instansi	Jumlah Anak/Anak Kantor/Instansi Kantor/Instansi	Jumlah Anak/Anak Kantor/Instansi Kantor/Instansi	Jumlah Anak/Anak Kantor/Instansi Kantor/Instansi					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															

No.	Name of the Company/Institution	Sector/Category	Address/Location	Type of Service	Financial Performance (USD)								Operational Metrics								Remarks	Status	Remarks								
					Revenue		Profit		Assets		Liabilities		Revenue		Profit		Assets		Liabilities												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
001	ABC Corp.	Technology	123 Main St, New York, NY 10001	Software Development	1000000	200000	500000	300000	200000	100000	1.5	0.67	1000000	200000	500000	300000	200000	100000	1.5	0.67	Active	Good									
002	XYZ Inc.	Manufacturing	456 Industrial Ave, Los Angeles, CA 90001	Automotive Parts	800000	150000	400000	250000	150000	80000	1.8	0.56	800000	150000	400000	250000	150000	80000	1.8	0.56	Active	Good									
003	DEF Ltd.	Retail	789 Shopping Center, Chicago, IL 60601	Department Store	1200000	250000	600000	350000	250000	120000	1.6	0.63	1200000	250000	600000	350000	250000	120000	1.6	0.63	Active	Good									
004	GHI Corp.	Healthcare	321 Medical Plaza, San Francisco, CA 94102	Medical Equipment	900000	180000	450000	280000	170000	90000	1.7	0.59	900000	180000	450000	280000	170000	90000	1.7	0.59	Active	Good									
005	JKL Group	Finance	654 Wall St, New York, NY 10005	Investment Services	1100000	220000	550000	320000	230000	110000	1.6	0.62	1100000	220000	550000	320000	230000	110000	1.6	0.62	Active	Good									
006	MNO Corp.	Energy	987 Power Plant Rd, Houston, TX 77001	Electricity Generation	1300000	280000	650000	380000	270000	130000	1.5	0.64	1300000	280000	650000	380000	270000	130000	1.5	0.64	Active	Good									
007	PQR Ltd.	Telecommunications	210 Network Ave, Dallas, TX 75201	Internet Services	700000	140000	350000	220000	130000	70000	1.8	0.56	700000	140000	350000	220000	130000	70000	1.8	0.56	Active	Good									
008	STU Inc.	Transportation	543 Logistics Way, Miami, FL 33101	Freight Services	950000	190000	475000	290000	185000	95000	1.7	0.59	950000	190000	475000	290000	185000	95000	1.7	0.59	Active	Good									
009	VWX Corp.	Food & Beverage	876 Culinary Dr, Portland, OR 97201	Food Processing	1050000	210000	525000	310000	215000	105000	1.6	0.62	1050000	210000	525000	310000	215000	105000	1.6	0.62	Active	Good									
010	YZA Group	Media	101 Broadcast Blvd, Los Angeles, CA 90001	Television Production	1150000	230000	575000	340000	235000	115000	1.6	0.62	1150000	230000	575000	340000	235000	115000	1.6	0.62	Active	Good									

[illegible]

[illegible]

Row	Activity Name (Activity ID)	Activity Location (Activity Address)	Activity Description (Activity Details)	Activity Status (Activity Status)	Project Budget (USD)								Project Revenue (USD)								Project Total (Total Budget - Total Revenue)	Project Profit (Total Revenue - Total Budget)	Project Loss (Total Budget - Total Revenue)
					Project Budget (USD)				Project Revenue (USD)				Project Revenue (USD)				Project Revenue (USD)						
					Budget	Revenue	Profit	Loss	Budget	Revenue	Profit	Loss	Budget	Revenue	Profit	Loss	Budget	Revenue	Profit	Loss			
1	Activity 1	Location 1	Description 1	Status 1	100000	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
2	Activity 2	Location 2	Description 2	Status 2	200000	200000	0	0	200000	200000	0	0	200000	200000	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0
3	Activity 3	Location 3	Description 3	Status 3	300000	300000	0	0	300000	300000	0	0	300000	300000	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0
4	Activity 4	Location 4	Description 4	Status 4	400000	400000	0	0	400000	400000	0	0	400000	400000	0	0	400000	400000	0	0	0	0	0
5	Activity 5	Location 5	Description 5	Status 5	500000	500000	0	0	500000	500000	0	0	500000	500000	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0
6	Activity 6	Location 6	Description 6	Status 6	600000	600000	0	0	600000	600000	0	0	600000	600000	0	0	600000	600000	0	0	0	0	0
7	Activity 7	Location 7	Description 7	Status 7	700000	700000	0	0	700000	700000	0	0	700000	700000	0	0	700000	700000	0	0	0	0	0
8	Activity 8	Location 8	Description 8	Status 8	800000	800000	0	0	800000	800000	0	0	800000	800000	0	0	800000	800000	0	0	0	0	0
9	Activity 9	Location 9	Description 9	Status 9	900000	900000	0	0	900000	900000	0	0	900000	900000	0	0	900000	900000	0	0	0	0	0
10	Activity 10	Location 10	Description 10	Status 10	1000000	1000000	0	0	1000000	1000000	0	0	1000000	1000000	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0
11	Activity 11	Location 11	Description 11	Status 11	1100000	1100000	0	0	1100000	1100000	0	0	1100000	1100000	0	0	1100000	1100000	0	0	0	0	0
12	Activity 12	Location 12	Description 12	Status 12	1200000	1200000	0	0	1200000	1200000	0	0	1200000	1200000	0	0	1200000	1200000	0	0	0	0	0
13	Activity 13	Location 13	Description 13	Status 13	1300000	1300000	0	0	1300000	1300000	0	0	1300000	1300000	0	0	1300000	1300000	0	0	0	0	0
14	Activity 14	Location 14	Description 14	Status 14	1400000	1400000	0	0	1400000	1400000	0	0	1400000	1400000	0	0	1400000	1400000	0	0	0	0	0
15	Activity 15	Location 15	Description 15	Status 15	1500000	1500000	0	0	1500000	1500000	0	0	1500000	1500000	0	0	1500000	1500000	0	0	0	0	0
16	Activity 16	Location 16	Description 16	Status 16	1600000	1600000	0	0	1600000	1600000	0	0	1600000	1600000	0	0	1600000	1600000	0	0	0	0	0
17	Activity 17	Location 17	Description 17	Status 17	1700000	1700000	0	0	1700000	1700000	0	0	1700000	1700000	0	0	1700000	1700000	0	0	0	0	0
18	Activity 18	Location 18	Description 18	Status 18	1800000	1800000	0	0	1800000	1800000	0	0	1800000	1800000	0	0	1800000	1800000	0	0	0	0	0
19	Activity 19	Location 19	Description 19	Status 19	1900000	1900000	0	0	1900000	1900000	0	0	1900000	1900000	0	0	1900000	1900000	0	0	0	0	0
20	Activity 20	Location 20	Description 20	Status 20	2000000	2000000	0	0	2000000	2000000	0	0	2000000	2000000	0	0	2000000	2000000	0	0	0	0	0



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bappeda Kabupaten Gunungkidul

Jl. Satria No.3, Wonosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta (55812)

Telepon : (0274) 391761, Faksimile : (0274) 391701

Laman : bappeda-gunungkidulkab.go.id, Pos-el : bappeda@gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 000.7.2.4/2615/2025

Pada hari ini jumat tanggal sepuluh bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lima, kami masing-masing:

1. Nama : MURDIYANA, SE
NIP : 196905311991031003
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Evaluasi
Alamat : Bappeda Kabupaten Gunungkidul
yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Nama : YULITA SAVITRI, SE
NIP : 198007112010012003
Pangkat/Gol : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Ketua Tim Kerja Perencanaan
Alamat : Bappeda Kabupaten Gunungkidul
yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan Desk Evaluasi Capaian Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan III Tahun 2025 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Pagu RPJMD Periode 2021-2026 Rp 45.922.222.838,00
- b. Capaian RKPD sampai dengan Tahun 2024 Rp 26.990.966.538,00
- c. Pagu Anggaran RKPD Tahun 2025 sebesar Rp 9.562.577.319,00
- d. Capaian kinerja RKPD sebesar 57,64%
- e. Capaian keuangan RKPD sebesar 54,18% atau Rp 5.181.395.108,00
- f. Capaian kinerja RPJMD sebesar 99,19%
- g. Capaian keuangan RPJMD sebesar 70,06% atau Rp 32.172.354.546,00
- h. Rincian capaian kinerja dan keuangan RKPD dan RPJMD terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua:

YULITA SAVITRI, SE
Penata Tk. I, III/d
NIP. 198007112010012003

Dibuat di : Wonosari
Pihak Kesatu

MURDIYANA, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 196905311991031003

Mengetahui/Mengesahkan
Kepala Bappeda

MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si
Pemimpin Utama Muda, IV/c
NIP. 197502221993111001

No.	Project Name	Project Location	Project Description	Project Status	Project Budget (USD)								Project Revenue (USD)								Project Notes	Project Manager	Project Date
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Project A	Location A	Description A	Status A	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	Project A Notes	Manager A	2023-01-01
2	Project B	Location B	Description B	Status B	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	Project B Notes	Manager B	2023-02-01
3	Project C	Location C	Description C	Status C	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	Project C Notes	Manager C	2023-03-01
4	Project D	Location D	Description D	Status D	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	Project D Notes	Manager D	2023-04-01
5	Project E	Location E	Description E	Status E	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	Project E Notes	Manager E	2023-05-01
6	Project F	Location F	Description F	Status F	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	Project F Notes	Manager F	2023-06-01
7	Project G	Location G	Description G	Status G	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	Project G Notes	Manager G	2023-07-01
8	Project H	Location H	Description H	Status H	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	Project H Notes	Manager H	2023-08-01
9	Project I	Location I	Description I	Status I	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	Project I Notes	Manager I	2023-09-01
10	Project J	Location J	Description J	Status J	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	Project J Notes	Manager J	2023-10-01
11	Project K	Location K	Description K	Status K	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	Project K Notes	Manager K	2023-11-01
12	Project L	Location L	Description L	Status L	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	Project L Notes	Manager L	2023-12-01
13	Project M	Location M	Description M	Status M	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	Project M Notes	Manager M	2024-01-01
14	Project N	Location N	Description N	Status N	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	Project N Notes	Manager N	2024-02-01
15	Project O	Location O	Description O	Status O	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	Project O Notes	Manager O	2024-03-01
16	Project P	Location P	Description P	Status P	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	Project P Notes	Manager P	2024-04-01
17	Project Q	Location Q	Description Q	Status Q	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	Project Q Notes	Manager Q	2024-05-01
18	Project R	Location R	Description R	Status R	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	Project R Notes	Manager R	2024-06-01
19	Project S	Location S	Description S	Status S	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	Project S Notes	Manager S	2024-07-01
20	Project T	Location T	Description T	Status T	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	Project T Notes	Manager T	2024-08-01

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Jl. Satria No.3, Wonosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta (55812)

Telepon : (0274) 391761, Faksimile : (0274) 391701

Laman : bappeda.gunungkidulkab.go.id, Pos-el : bappeda@gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 000.7.2.4/0171/2026

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam, kami masing-masing:

1. Nama : MURDIYANA, SE
 NIP : 196905311991031003
 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d
 Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Evaluasi
 Alamat : Bappeda Kabupaten Gunungkidul
 yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Nama : YULITA SAVITRI, SE
 NIP : 198007112010012003
 Pangkat/Gol : Penata Tk. I, III/d
 Jabatan : Ketua Tim Kerja Perencanaan
 Alamat : Bappeda Kabupaten Gunungkidul
 yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan Desk Evaluasi Capaian Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan IV Tahun 2025 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Pagu RPJMD Periode 2021-2026 Rp 45.922.222.838,00
- b. Capaian RKPD sampai dengan Tahun 2024 Rp 26.990.969.538,00
- c. Pagu Anggaran RKPD Tahun 2025 sebesar Rp 7.809.952.619,00
- d. Capaian kinerja RKPD sebesar 81,45%
- e. Capaian keuangan RKPD sebesar 92,22% atau Rp 7.017.880.937,00
- f. Capaian kinerja RPJMD sebesar 101,04%
- g. Capaian keuangan RPJMD sebesar 74,06% atau Rp 34.006.650.475,00
- h. Rincian capaian kinerja dan keuangan RKPD dan RPJMD terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

YULITA SAVITRI, SE
 Penata Tk. I, III/d
 NIP. 198007112010012003

Dibuat di : Wonosari
 Pihak Kesatu

MURDIYANA, SE
 Penata Tingkat I, III/d
 NIP. 196905311991031003

Mengetahui/Mengesakan

Pdt. Kepala Bappeda

CHAIRUL AGUS MANTARA, S.IP, MM
 Pembina Tingkat I, IV/b
 NIP. 197206261992031003



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11 - 6097 TAHUN 2025

TENTANG

INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah;
- b. Bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengukuran indeks inovasi daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025 Revisi Ke-9 (Sembilan) Nomor SP DIPA-010.11.1.403222/2025 tanggal 17 November 2025;
 2. Berita Acara Hasil Validasi dan Quality Control Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Prioritas I Tahun 2025 Nomor 000.10/4351/BSKDN tanggal 23 Oktober 2025;
 3. Berita Acara Hasil Validasi dan Quality Control Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Prioritas II Tahun 2025 Nomor 000.10/4488/BSKDN tanggal 29 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025.**
- KESATU** :
- Melakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.

- KEDUA : Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi dan dilakukan *quality control* oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology* (SMART CITY) Universitas Indonesia dan Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin.
- KETIGA : Menetapkan Indeks Inovasi daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025 dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2025
MENTERI DALAM NEGERI,

td

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
5. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Ketua Ombudsman;
7. Gubernur seluruh Indonesia; dan
8. Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Dr. Asnawa, AP., M.Si
Penghimpun Utama Madya (IV/d)
NIP. 197410151993111003

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 400.10.11 - 6097 TAHUN 2025
 TENTANG
 INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI,
 KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025

INDEKS INOVASI DAERAH
 PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025

A. Kategori Provinsi:

Rekapitulasi:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1) Sangat Inovatif | : 8 Provinsi |
| 2) Inovatif | : 23 Provinsi |
| 3) Kurang Inovatif | : 7 Provinsi |
| 4) Tidak Dapat Dinilai (Disclaimer) | : 0 Provinsi |

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1.	Provinsi Jawa Timur	90,84	Sangat Inovatif
2.	Provinsi Sumatera Barat	86,96	Sangat Inovatif
3.	Provinsi Jawa Barat	85,05	Sangat Inovatif
4.	Provinsi DKI Jakarta	82,93	Sangat Inovatif
5.	Provinsi Jawa Tengah	82,63	Sangat Inovatif
6.	Provinsi Sumatera Selatan	81,23	Sangat Inovatif
7.	Provinsi Bali	77,04	Sangat Inovatif
8.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	73,25	Sangat Inovatif
9.	Provinsi Sumatera Utara	64,79	Inovatif
10.	Provinsi Maluku Utara	63,64	Inovatif
11.	Provinsi Banten	63,35	Inovatif
12.	Provinsi Sulawesi Selatan	62,35	Inovatif
13.	Provinsi Aceh	62,23	Inovatif
14.	Provinsi Kalimantan Timur	59,90	Inovatif
15.	Provinsi Jambi	59,75	Inovatif
16.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	59,70	Inovatif
17.	Provinsi Sulawesi Tenggara	58,16	Inovatif
18.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	57,85	Inovatif
19.	Provinsi Sulawesi Tengah	57,12	Inovatif
20.	Provinsi Gorontalo	55,01	Inovatif
21.	Provinsi Lampung	52,89	Inovatif
22.	Provinsi Kepulauan Riau	52,85	Inovatif
23.	Provinsi Riau	52,33	Inovatif
24.	Provinsi Kalimantan Barat	51,68	Inovatif
25.	Provinsi Kalimantan Utara	50,84	Inovatif
26.	Provinsi Kalimantan Selatan	49,82	Inovatif
27.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	48,50	Inovatif
28.	Provinsi Sulawesi Barat	47,76	Inovatif
29.	Provinsi Papua Tengah	45,83	Inovatif
30.	Provinsi Maluku	45,61	Inovatif
31.	Provinsi Bengkulu	40,41	Inovatif
32.	Provinsi Sulawesi Utara	38,66	Kurang Inovatif
33.	Provinsi Kalimantan Tengah	36,99	Kurang Inovatif
34.	Provinsi Papua	32,79	Kurang Inovatif
35.	Provinsi Papua Selatan	27,60	Kurang Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
36.	Provinsi Papua Barat	17,14	Kurang Inovatif
37.	Provinsi Papua Pegunungan	3,80	Kurang Inovatif
38.	Provinsi Papua Barat Daya	1,20	Kurang Inovatif

B. Kategori Kabupaten

Rekapitulasi:

1) Sangat Inovatif	:69 Kabupaten
2) Inovatif	:231 Kabupaten
3) Kurang Inovatif	:100 Kabupaten
4) Tidak Dapat Dinilai (Disclaimer)	:15 Kabupaten

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1.	Kabupaten Balangan	96,80	Sangat Inovatif
2.	Kabupaten Lamongan	95,23	Sangat Inovatif
3.	Kabupaten Banyuwangi	94,84	Sangat Inovatif
4.	Kabupaten Bogor	94,40	Sangat Inovatif
5.	Kabupaten Wonogiri	94,25	Sangat Inovatif
6.	Kabupaten Bangka	93,71	Sangat Inovatif
7.	Kabupaten Bangkalan	93,11	Sangat Inovatif
8.	Kabupaten Tabalong	92,09	Sangat Inovatif
9.	Kabupaten Malang	91,70	Sangat Inovatif
10.	Kabupaten Blora	91,68	Sangat Inovatif
11.	Kabupaten Sidoarjo	91,54	Sangat Inovatif
12.	Kabupaten Sragen	91,11	Sangat Inovatif
13.	Kabupaten Boyolali	89,42	Sangat Inovatif
14.	Kabupaten Sampang	89,05	Sangat Inovatif
15.	Kabupaten Temanggung	88,88	Sangat Inovatif
16.	Kabupaten Ngawi	88,58	Sangat Inovatif
17.	Kabupaten Ogan Ilir	88,22	Sangat Inovatif
18.	Kabupaten Situbondo	86,65	Sangat Inovatif
19.	Kabupaten Magelang	86,15	Sangat Inovatif
20.	Kabupaten Pamekasan	86,15	Sangat Inovatif
21.	Kabupaten Bantul	83,64	Sangat Inovatif
22.	Kabupaten Klaten	83,49	Sangat Inovatif
23.	Kabupaten Mesuji	82,65	Sangat Inovatif
24.	Kabupaten Padang Pariaman	82,48	Sangat Inovatif
25.	Kabupaten Trenggalek	81,40	Sangat Inovatif
26.	Kabupaten Tulungagung	81,29	Sangat Inovatif
27.	Kabupaten Sumedang	80,49	Sangat Inovatif
28.	Kabupaten Jember	80,32	Sangat Inovatif
29.	Kabupaten Bandung	79,83	Sangat Inovatif
30.	Kabupaten Pati	79,60	Sangat Inovatif
31.	Kabupaten Muara Enim	79,45	Sangat Inovatif
32.	Kabupaten Lampung Utara	77,79	Sangat Inovatif
33.	Kabupaten Tegal	77,59	Sangat Inovatif
34.	Kabupaten Purworejo	75,45	Sangat Inovatif
35.	Kabupaten Tangerang	75,11	Sangat Inovatif
36.	Kabupaten Puncak Abad Lemataing Ilir	75,01	Sangat Inovatif
37.	Kabupaten Grobogan	74,76	Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
38.	Kabupaten Bitar	73,91	Sangat Inovatif
39.	Kabupaten Pasuruan	73,80	Sangat Inovatif
40.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	73,59	Sangat Inovatif
41.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	73,58	Sangat Inovatif
42.	Kabupaten Tapin	72,76	Sangat Inovatif
43.	Kabupaten Buntun	72,53	Sangat Inovatif
44.	Kabupaten Banyuwangi	71,94	Sangat Inovatif
45.	Kabupaten Bangli	71,92	Sangat Inovatif
46.	Kabupaten Aceh Jaya	70,73	Sangat Inovatif
47.	Kabupaten Kudus	70,46	Sangat Inovatif
48.	Kabupaten Empat Lawang	70,44	Sangat Inovatif
49.	Kabupaten Kulon Progo	70,12	Sangat Inovatif
50.	Kabupaten Banggai	70,07	Sangat Inovatif
51.	Kabupaten Dampu	70,06	Sangat Inovatif
52.	Kabupaten Jombang	69,86	Sangat Inovatif
53.	Kabupaten Tuban	69,41	Sangat Inovatif
54.	Kabupaten Brebes	69,10	Sangat Inovatif
55.	Kabupaten Madani	69,08	Sangat Inovatif
56.	Kabupaten Sukoharjo	68,97	Sangat Inovatif
57.	Kabupaten Lampung Selatan	68,43	Sangat Inovatif
58.	Kabupaten Tabanan	68,26	Sangat Inovatif
59.	Kabupaten Bangka Tengah	68,10	Sangat Inovatif
60.	Kabupaten Pringswa	67,15	Sangat inovatif
61.	Kabupaten Dharmasraya	66,80	Sangat Inovatif
62.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	66,50	Sangat Inovatif
63.	Kabupaten Pekalongan	66,35	Sangat inovatif
64.	Kabupaten Tanggamus	66,32	Sangat Inovatif
65.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	66,14	Sangat Inovatif
66.	Kabupaten Klungkung	66,09	Sangat Inovatif
67.	Kabupaten Sorong	66,09	Sangat Inovatif
68.	Kabupaten Minahasa Utara	65,68	Sangat Inovatif
69.	Kabupaten Mojokerto	65,35	Sangat Inovatif
70.	Kabupaten Bintan	64,47	Inovatif
71.	Kabupaten Morowali	64,43	Inovatif
72.	Kabupaten Lombok Tengah	64,20	Inovatif
73.	Kabupaten Kendal	64,11	Inovatif
74.	Kabupaten Sumba Timur	64,06	Inovatif
75.	Kabupaten Deli Serdang	64,02	Inovatif
76.	Kabupaten Mamuju Tengah	63,82	Inovatif
77.	Kabupaten Gianyar	63,69	Inovatif
78.	Kabupaten Sukahumi	63,61	Inovatif
79.	Kabupaten Tulang Bawang	63,54	Inovatif
80.	Kabupaten Bondowoso	63,41	Inovatif
81.	Kabupaten Kebumen	63,41	Inovatif
82.	Kabupaten Lumajang	63,20	Inovatif
83.	Kabupaten Buleleng	62,96	Inovatif
84.	Kabupaten Pacitan	62,84	Inovatif
85.	Kabupaten Banyuwangi	62,55	Inovatif
86.	Kabupaten Halmahera Selatan	62,42	Inovatif
87.	Kabupaten Siemam	62,29	Inovatif
88.	Kabupaten Bengkulu Selatan	62,27	Inovatif
89.	Kabupaten Semarang	62,14	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
90.	Kabupaten Bulukumba	62,10	Inovatif
91.	Kabupaten Barito Selatan	61,78	Inovatif
92.	Kabupaten Magetan	61,71	Inovatif
93.	Kabupaten Cilacap	61,67	Inovatif
94.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	61,63	Inovatif
95.	Kabupaten Halmahera Tengah	61,47	Inovatif
96.	Kabupaten Saribas	60,94	Inovatif
97.	Kabupaten Banjar	60,71	Inovatif
98.	Kabupaten Pemasang	60,65	Inovatif
99.	Kabupaten Nganjuk	60,49	Inovatif
100.	Kabupaten Karu	60,36	Inovatif
101.	Kabupaten Pasaman Barat	60,17	Inovatif
102.	Kabupaten Bojonegara	59,93	Inovatif
103.	Kabupaten Karanganyar	59,89	Inovatif
104.	Kabupaten Gunung Mas	59,83	Inovatif
105.	Kabupaten Kutai Kartanegara	59,81	Inovatif
106.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	59,69	Inovatif
107.	Kabupaten Pelalawan	59,65	Inovatif
108.	Kabupaten Barru	59,28	Inovatif
109.	Kabupaten Lampung Barat	59,03	Inovatif
110.	Kabupaten Majalengka	59,00	Inovatif
111.	Kabupaten Pasaman	58,91	Inovatif
112.	Kabupaten Karangasem	58,86	Inovatif
113.	Kabupaten Lombok Timur	58,74	Inovatif
114.	Kabupaten Lombok Utara	58,54	Inovatif
115.	Kabupaten Sumenep	58,52	Inovatif
116.	Kabupaten Kampar	58,43	Inovatif
117.	Kabupaten Belitung Timur	58,29	Inovatif
118.	Kabupaten Malinau	58,21	Inovatif
119.	Kabupaten Gresik	57,98	Inovatif
120.	Kabupaten Lebak	57,79	Inovatif
121.	Kabupaten Bekasi	57,71	Inovatif
122.	Kabupaten Batu Bara	57,64	Inovatif
123.	Kabupaten Subang	57,29	Inovatif
124.	Kabupaten Garut	57,22	Inovatif
125.	Kabupaten Luwu Timur	56,87	Inovatif
126.	Kabupaten Pesisir Selatan	56,75	Inovatif
127.	Kabupaten Humbang Hasundutan	56,43	Inovatif
128.	Kabupaten Tanah Laut	56,40	Inovatif
129.	Kabupaten Kotawaringin Timur	56,34	Inovatif
130.	Kabupaten Bangka Selatan	56,26	Inovatif
131.	Kabupaten Probolinggo	56,21	Inovatif
132.	Kabupaten Cirebon	56,16	Inovatif
133.	Kabupaten Aceh Tamiang	56,08	Inovatif
134.	Kabupaten Jenepono	55,74	Inovatif
135.	Kabupaten Aceh Barat	55,64	Inovatif
136.	Kabupaten Mahika Tengah	55,60	Inovatif
137.	Kabupaten Ciamis	55,56	Inovatif
138.	Kabupaten Halmahera Timur	55,46	Inovatif
139.	Kabupaten Batang	55,32	Inovatif
140.	Kabupaten Agam	55,23	Inovatif
141.	Kabupaten Badung	55,15	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
142.	Kabupaten Sumbawa Barat	55,09	Inovatif
143.	Kabupaten Tana Tidung	55,00	Inovatif
144.	Kabupaten Halmahera Utara	54,91	Inovatif
145.	Kabupaten Demak	54,89	Inovatif
146.	Kabupaten Pasawaran	54,83	Inovatif
147.	Kabupaten Manggarai	54,78	Inovatif
148.	Kabupaten Asahan	54,71	Inovatif
149.	Kabupaten Bireuen	54,54	Inovatif
150.	Kabupaten Boalemo	54,52	Inovatif
151.	Kabupaten Seluma	54,41	Inovatif
152.	Kabupaten Bengkulu Utara	54,37	Inovatif
153.	Kabupaten Jepara	54,11	Inovatif
154.	Kabupaten Wonosobo	53,90	Inovatif
155.	Kabupaten Cianjur	53,03	Inovatif
156.	Kabupaten Kotawaringin Barat	52,95	Inovatif
157.	Kabupaten Indragayu	52,92	Inovatif
158.	Kabupaten Gayo Lues	52,76	Inovatif
159.	Kabupaten Gunungkidul	52,75	Inovatif
160.	Kabupaten Aceh Singkil	52,74	Inovatif
161.	Kabupaten Kubu Raya	52,73	Inovatif
162.	Kabupaten Rembang	52,44	Inovatif
163.	Kabupaten Takalar	52,32	Inovatif
164.	Kabupaten Karawang	52,11	Inovatif
165.	Kabupaten Purbalingga	52,01	Inovatif
166.	Kabupaten Sumbawa	51,98	Inovatif
167.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	51,97	Inovatif
168.	Kabupaten Kaimana	51,80	Inovatif
169.	Kabupaten Togo Una Una	51,78	Inovatif
170.	Kabupaten Pidie	51,54	Inovatif
171.	Kabupaten Barito Kuala	51,38	Inovatif
172.	Kabupaten Konawe Selatan	51,35	Inovatif
173.	Kabupaten Flores Timur	51,33	Inovatif
174.	Kabupaten Ponorogo	51,26	Inovatif
175.	Kabupaten Soppeng	51,09	Inovatif
176.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	50,96	Inovatif
177.	Kabupaten Tasikmalaya	50,78	Inovatif
178.	Kabupaten Kerinci	50,71	Inovatif
179.	Kabupaten Karimun	50,70	Inovatif
180.	Kabupaten Bangko Barat	50,32	Inovatif
181.	Kabupaten Barito Utara	50,24	Inovatif
182.	Kabupaten Serang	50,10	Inovatif
183.	Kabupaten Ngada	49,97	Inovatif
184.	Kabupaten Solok Selatan	49,86	Inovatif
185.	Kabupaten Sanggau	49,78	Inovatif
186.	Kabupaten Nias	49,72	Inovatif
187.	Kabupaten Solok	49,61	Inovatif
188.	Kabupaten Purwakarta	49,60	Inovatif
189.	Kabupaten Luwu Utara	49,53	Inovatif
190.	Kabupaten Seram Bagian Barat	49,46	Inovatif
191.	Kabupaten Aceh Timur	49,42	Inovatif
192.	Kabupaten Serdang Bedagai	49,36	Inovatif
193.	Kabupaten Sikka	49,35	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
194.	Kabupaten Luwu	49,34	Inovatif
195.	Kabupaten Padang Lawas Utara	49,26	Inovatif
196.	Kabupaten Dairi	49,19	Inovatif
197.	Kabupaten Aceh Besar	49,00	Inovatif
198.	Kabupaten Indragiri Hilir	48,98	Inovatif
199.	Kabupaten Buol	48,96	Inovatif
200.	Kabupaten Kutai Timur	48,88	Inovatif
201.	Kabupaten Pakpak Bharat	48,71	Inovatif
202.	Kabupaten Bombana	48,69	Inovatif
203.	Kabupaten Kepulauan Meranti	48,64	Inovatif
204.	Kabupaten Nagan Raya	48,53	Inovatif
205.	Kabupaten Pesisir Barat	48,48	Inovatif
206.	Kabupaten Sijunjung	48,45	Inovatif
207.	Kabupaten Lima Puluh Kota	48,34	Inovatif
208.	Kabupaten Aceh Tengah	48,28	Inovatif
209.	Kabupaten Timor Tengah Utara	48,22	Inovatif
210.	Kabupaten Sukamara	48,20	Inovatif
211.	Kabupaten Gorontalo Utara	48,16	Inovatif
212.	Kabupaten Kotabaru	48,03	Inovatif
213.	Kabupaten Wajo	47,84	Inovatif
214.	Kabupaten Langkat	47,81	Inovatif
215.	Kabupaten Nias Utara	47,74	Inovatif
216.	Kabupaten Pandeglang	47,63	Inovatif
217.	Kabupaten Konawe Utara	47,60	Inovatif
218.	Kabupaten Tapanuli Selatan	47,46	Inovatif
219.	Kabupaten Lombok Barat	47,44	Inovatif
220.	Kabupaten Manggarai Barat	47,43	Inovatif
221.	Kabupaten Siak	47,37	Inovatif
222.	Kabupaten Indragiri Hulu	47,34	Inovatif
223.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	47,21	Inovatif
224.	Kabupaten Ketapang	47,21	Inovatif
225.	Kabupaten Lingga	47,10	Inovatif
226.	Kabupaten Bandung Barat	47,02	Inovatif
227.	Kabupaten Banjarnegara	46,96	Inovatif
228.	Kabupaten Mimika	46,95	Inovatif
229.	Kabupaten Bima	46,91	Inovatif
230.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	46,75	Inovatif
231.	Kabupaten Lembang	46,63	Inovatif
232.	Kabupaten Bengkulu	46,55	Inovatif
233.	Kabupaten Aceh Utara	46,52	Inovatif
234.	Kabupaten Tanah Bumbu	46,31	Inovatif
235.	Kabupaten Berau	46,21	Inovatif
236.	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	46,18	Inovatif
237.	Kabupaten Morowali Utara	46,13	Inovatif
238.	Kabupaten Pinrang	45,97	Inovatif
239.	Kabupaten Kepulauan Selayar	45,94	Inovatif
240.	Kabupaten Konawe	45,90	Inovatif
241.	Kabupaten Nabire	45,72	Inovatif
242.	Kabupaten Buru Selatan	45,67	Inovatif
243.	Kabupaten Mandailing Natal	45,64	Inovatif
244.	Kabupaten Paser	45,46	Inovatif
245.	Kabupaten Lampung Timur	45,44	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
246.	Kabupaten Tapanuli Utara	45,43	Inovatif
247.	Kabupaten Natuna	45,35	Inovatif
248.	Kabupaten Jember	45,25	Inovatif
249.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	45,20	Inovatif
250.	Kabupaten Pangandaran	45,19	Inovatif
251.	Kabupaten Sinjai	45,15	Inovatif
252.	Kabupaten Bener Meriah	45,01	Inovatif
253.	Kabupaten Kuantan Singingi	45,01	Inovatif
254.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	44,88	Inovatif
255.	Kabupaten Sabu Raijua	44,75	Inovatif
256.	Kabupaten Penajam Paser Utara	44,73	Inovatif
257.	Kabupaten Maros	44,60	Inovatif
258.	Kabupaten Nias Selatan	44,22	Inovatif
259.	Kabupaten Labuhanbatu	44,14	Inovatif
260.	Kabupaten Banggai Kepulauan	44,10	Inovatif
261.	Kabupaten Musi Banyuasin	44,08	Inovatif
262.	Kabupaten Toraja Utara	44,00	Inovatif
263.	Kabupaten Kaur	43,95	Inovatif
264.	Kabupaten Merangin	43,84	Inovatif
265.	Kabupaten Polewali Mandar	43,67	Inovatif
266.	Kabupaten Musi Rawas	43,51	Inovatif
267.	Kabupaten Katingan	43,50	Inovatif
268.	Kabupaten Bone Bolango	43,48	Inovatif
269.	Kabupaten Kediri	43,34	Inovatif
270.	Kabupaten Rokan Hulu	43,25	Inovatif
271.	Kabupaten Tanah Datar	43,17	Inovatif
272.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	43,11	Inovatif
273.	Kabupaten Way Kanan	43,00	Inovatif
274.	Kabupaten Bengkayang	42,75	Inovatif
275.	Kabupaten Tebo	42,63	Inovatif
276.	Kabupaten Kepulauan Anambas	42,55	Inovatif
277.	Kabupaten Pulau Morotai	42,54	Inovatif
278.	Kabupaten Donggala	42,50	Inovatif
279.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	42,36	Inovatif
280.	Kabupaten Majene	42,21	Inovatif
281.	Kabupaten Bantaeng	42,16	Inovatif
282.	Kabupaten Sidenreng Rappang	42,10	Inovatif
283.	Kabupaten Lebong	42,08	Inovatif
284.	Kabupaten Buton	42,02	Inovatif
285.	Kabupaten Bone	41,85	Inovatif
286.	Kabupaten Murung Raya	41,75	Inovatif
287.	Kabupaten Landak	41,50	Inovatif
288.	Kabupaten Lampung Tengah	41,48	Inovatif
289.	Kabupaten Mamuju	41,42	Inovatif
290.	Kabupaten Musi Rawas Utara	41,40	Inovatif
291.	Kabupaten Sekeloa	41,31	Inovatif
292.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	41,27	Inovatif
293.	Kabupaten Barito Timur	41,22	Inovatif
294.	Kabupaten Bengkulu Tengah	41,10	Inovatif
295.	Kabupaten Simeulue	41,01	Inovatif
296.	Kabupaten Tapanuli Tengah	40,88	Inovatif
297.	Kabupaten Gowa	40,73	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
298.	Kabupaten Banggai Laut	40,69	Inovatif
299.	Kabupaten Jayapura	40,22	Inovatif
300.	Kabupaten Parigi Moutong	40,04	Inovatif
301.	Kabupaten Pidie Jaya	39,96	Kurang Inovatif
302.	Kabupaten Maluku Barat Daya	39,92	Kurang Inovatif
303.	Kabupaten Lembata	39,87	Kurang Inovatif
304.	Kabupaten Gorontalo	39,86	Kurang Inovatif
305.	Kabupaten Bolaang Mongondow	39,58	Kurang Inovatif
306.	Kabupaten Toli-Toli	39,51	Kurang Inovatif
307.	Kabupaten Sumba Barat	39,48	Kurang Inovatif
308.	Kabupaten Tobo	39,12	Kurang Inovatif
309.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	38,80	Kurang Inovatif
310.	Kabupaten Lahat	38,75	Kurang Inovatif
311.	Kabupaten Aceh Selatan	38,74	Kurang Inovatif
312.	Kabupaten Rokan Hilir	38,67	Kurang Inovatif
313.	Kabupaten Belitang	38,66	Kurang Inovatif
314.	Kabupaten Konawe Kepulauan	38,66	Kurang Inovatif
315.	Kabupaten Sarri	38,66	Kurang Inovatif
316.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	38,33	Kurang Inovatif
317.	Kabupaten Kolaka	38,32	Kurang Inovatif
318.	Kabupaten Sintang	37,67	Kurang Inovatif
319.	Kabupaten Melawi	37,27	Kurang Inovatif
320.	Kabupaten Rote Ndao	37,24	Kurang Inovatif
321.	Kabupaten Kolaka Utara	37,22	Kurang Inovatif
322.	Kabupaten Sumba Barat Daya	37,06	Kurang Inovatif
323.	Kabupaten Kayong Utara	36,91	Kurang Inovatif
324.	Kabupaten Samosir	36,70	Kurang Inovatif
325.	Kabupaten Belu	36,50	Kurang Inovatif
326.	Kabupaten Mempawah	36,38	Kurang Inovatif
327.	Kabupaten Poso	36,02	Kurang Inovatif
328.	Kabupaten Simalungun	35,54	Kurang Inovatif
329.	Kabupaten Rejang Lebong	35,46	Kurang Inovatif
330.	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	35,04	Kurang Inovatif
331.	Kabupaten Halmahera Barat	34,54	Kurang Inovatif
332.	Kabupaten Kuningan	33,39	Kurang Inovatif
333.	Kabupaten Muna	33,14	Kurang Inovatif
334.	Kabupaten Triuk Wondama	33,03	Kurang Inovatif
335.	Kabupaten Pohuwato	32,99	Kurang Inovatif
336.	Kabupaten Seruyan	32,87	Kurang Inovatif
337.	Kabupaten Kapang	32,34	Kurang Inovatif
338.	Kabupaten Buton Selatan	32,00	Kurang Inovatif
339.	Kabupaten Batanghari	29,10	Kurang Inovatif
340.	Kabupaten Sumba Tengah	28,30	Kurang Inovatif
341.	Kabupaten Kapuas	27,26	Kurang Inovatif
342.	Kabupaten Merauke	25,56	Kurang Inovatif
343.	Kabupaten Muaro Jambi	24,88	Kurang Inovatif
344.	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	24,44	Kurang Inovatif
345.	Kabupaten Nias Barat	24,28	Kurang Inovatif
346.	Kabupaten Kotai Barat	21,64	Kurang Inovatif
347.	Kabupaten Wakatobi	21,46	Kurang Inovatif
348.	Kabupaten Aceh Barat Daya	21,16	Kurang Inovatif
349.	Kabupaten Kapuas Hulu	20,82	Kurang Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
350.	Kabupaten Fak Fak	20,62	Kurang Inovatif
351.	Kabupaten Kolaka Timur	19,38	Kurang Inovatif
352.	Kabupaten Tana Toraja	18,36	Kurang Inovatif
353.	Kabupaten Kepahiang	18,24	Kurang Inovatif
354.	Kabupaten Ende	17,78	Kurang Inovatif
355.	Kabupaten Enrekang	17,20	Kurang Inovatif
356.	Kabupaten Buton Tengah	17,06	Kurang Inovatif
357.	Kabupaten Nagkeo	16,50	Kurang Inovatif
358.	Kabupaten Solorangun	16,36	Kurang Inovatif
359.	Kabupaten Dugyai	15,52	Kurang Inovatif
360.	Kabupaten Intan Jaya	14,68	Kurang Inovatif
361.	Kabupaten Sigi	14,50	Kurang Inovatif
362.	Kabupaten Numukan	13,48	Kurang Inovatif
363.	Kabupaten Pulang Pisau	13,40	Kurang Inovatif
364.	Kabupaten Mahuku Tenggara	13,12	Kurang Inovatif
365.	Kabupaten Kepulauan Aru	13,00	Kurang Inovatif
366.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	12,50	Kurang Inovatif
367.	Kabupaten Malaka	12,30	Kurang Inovatif
368.	Kabupaten Pegunungan Arfak	12,20	Kurang Inovatif
369.	Kabupaten Manokwari	12,12	Kurang Inovatif
370.	Kabupaten Aceh Tenggara	12,04	Kurang Inovatif
371.	Kabupaten Muna Barat	12,00	Kurang Inovatif
372.	Kabupaten Buru	11,90	Kurang Inovatif
373.	Kabupaten Asmat	11,50	Kurang Inovatif
374.	Kabupaten Keerom	10,20	Kurang Inovatif
375.	Kabupaten Deiyai	9,80	Kurang Inovatif
376.	Kabupaten Minahasa	9,80	Kurang Inovatif
377.	Kabupaten Mamasa	9,40	Kurang Inovatif
378.	Kabupaten Minahasa Tenggara	9,20	Kurang Inovatif
379.	Kabupaten Pulau Taliabu	9,10	Kurang Inovatif
380.	Kabupaten Mahakam Ulu	8,40	Kurang Inovatif
381.	Kabupaten Pasangkayu	8,40	Kurang Inovatif
382.	Kabupaten Manggarai Timur	8,00	Kurang Inovatif
383.	Kabupaten Teluk Bintuni	8,00	Kurang Inovatif
384.	Kabupaten Bungo	7,50	Kurang Inovatif
385.	Kabupaten Padang Lawas	7,30	Kurang Inovatif
386.	Kabupaten Seram Bagian Timur	7,20	Kurang Inovatif
387.	Kabupaten Kepulauan Yapen	7,10	Kurang Inovatif
388.	Kabupaten Mukomuko	6,20	Kurang Inovatif
389.	Kabupaten Alor	5,80	Kurang Inovatif
390.	Kabupaten Kepulauan Talaud	5,50	Kurang Inovatif
391.	Kabupaten Kepulauan Sula	4,50	Kurang Inovatif
392.	Kabupaten Buton Utara	4,20	Kurang Inovatif
393.	Kabupaten Mappi	3,90	Kurang Inovatif
394.	Kabupaten Yalimo	3,70	Kurang Inovatif
395.	Kabupaten Nduga	3,10	Kurang Inovatif
396.	Kabupaten Boven Digoel	2,10	Kurang Inovatif
397.	Kabupaten Minahasa Selatan	1,80	Kurang Inovatif
398.	Kabupaten Manokwari Selatan	1,20	Kurang Inovatif
399.	Kabupaten Paniai	1,20	Kurang Inovatif
400.	Kabupaten Puncak	1,20	Kurang Inovatif
401.	Kabupaten Biak Numfor	0,00	Tidak Dapat Dinilai

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
402.	Kabupaten Jayawijaya	0,00	Tidak Dapat Dinilai
403.	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	Tidak Dapat Dinilai
404.	Kabupaten Mamberamo Raya	0,00	Tidak Dapat Dinilai
405.	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00	Tidak Dapat Dinilai
406.	Kabupaten Maybrat	0,00	Tidak Dapat Dinilai
407.	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,00	Tidak Dapat Dinilai
408.	Kabupaten Puncak Jaya	0,00	Tidak Dapat Dinilai
409.	Kabupaten Raja Ampat	0,00	Tidak Dapat Dinilai
410.	Kabupaten Sorong Selatan	0,00	Tidak Dapat Dinilai
411.	Kabupaten Supiori	0,00	Tidak Dapat Dinilai
412.	Kabupaten Tambora	0,00	Tidak Dapat Dinilai
413.	Kabupaten Telikara	0,00	Tidak Dapat Dinilai
414.	Kabupaten Waropen	0,00	Tidak Dapat Dinilai
415.	Kabupaten Yahukimo	0,00	Tidak Dapat Dinilai

C. Kategori Kota

Rekapitulasi:

- 1) Sangat Inovatif : 31 Kota
- 2) Inovatif : 55 Kota
- 3) Kurang Inovatif : 7 Kota
- 4) Tidak Dapat Dinilai (Disclaimer) : 0 Kota

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1.	Kota Mojokerto	95,43	Sangat Inovatif
2.	Kota Surabaya	94,98	Sangat Inovatif
3.	Kota Bekasi	94,43	Sangat Inovatif
4.	Kota Tidore Kepulauan	92,61	Sangat Inovatif
5.	Kota Surakarta	90,59	Sangat Inovatif
6.	Kota Palembang	88,02	Sangat Inovatif
7.	Kota Padang Panjang	87,94	Sangat Inovatif
8.	Kota Pekalongan	85,91	Sangat Inovatif
9.	Kota Bima	85,64	Sangat Inovatif
10.	Kota Bandar Lampung	84,28	Sangat Inovatif
11.	Kota Sukabumi	83,52	Sangat Inovatif
12.	Kota Cimahi	83,42	Sangat Inovatif
13.	Kota Mataram	83,09	Sangat Inovatif
14.	Kota Bengkulu	82,31	Sangat Inovatif
15.	Kota Denpasar	81,70	Sangat Inovatif
16.	Kota Malang	81,14	Sangat Inovatif
17.	Kota Probolinggo	79,02	Sangat Inovatif
18.	Kota Madiun	75,18	Sangat Inovatif
19.	Kota Palopo	74,55	Sangat Inovatif
20.	Kota Batu	73,39	Sangat Inovatif
21.	Kota Tangerang	72,94	Sangat Inovatif
22.	Kota Jambi	71,75	Sangat Inovatif
23.	Kota Yogyakarta	69,64	Sangat Inovatif
24.	Kota Semarang	69,02	Sangat Inovatif
25.	Kota Tegal	68,71	Sangat Inovatif
26.	Kota Padang	67,64	Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
27.	Kota Parepare	66,84	Sangat Inovatif
28.	Kota Serang	66,82	Sangat Inovatif
29.	Kota Sawahlunto	66,08	Sangat Inovatif
30.	Kota Kediri	66,01	Sangat Inovatif
31.	Kota Bandung	65,07	Sangat Inovatif
32.	Kota Pariaman	63,50	Inovatif
33.	Kota Solok	63,17	Inovatif
34.	Kota Banjarmasin	62,95	Inovatif
35.	Kota Batam	61,91	Inovatif
36.	Kota Makassar	61,75	Inovatif
37.	Kota Bintar	61,34	Inovatif
38.	Kota Bontang	60,94	Inovatif
39.	Kota Balikpapan	60,92	Inovatif
40.	Kota Tangtlang Selatan	60,76	Inovatif
41.	Kota Metro	60,71	Inovatif
42.	Kota Bogor	60,41	Inovatif
43.	Kota Pekanbaru	59,13	Inovatif
44.	Kota Dumai	59,03	Inovatif
45.	Kota Kotamobagu	58,62	Inovatif
46.	Kota Pontianak	58,47	Inovatif
47.	Kota Pahu	58,32	Inovatif
48.	Kota Samarinda	58,27	Inovatif
49.	Kota Medan	58,16	Inovatif
50.	Kota Banjar	57,80	Inovatif
51.	Kota Malang	57,62	Inovatif
52.	Kota Sungai Penuh	57,42	Inovatif
53.	Kota Kendari	56,28	Inovatif
54.	Kota Banjarbaru	56,19	Inovatif
55.	Kota Singkawang	55,60	Inovatif
56.	Kota Pangkal Pinang	55,52	Inovatif
57.	Kota Bitung	54,73	Inovatif
58.	Kota Lubuk Linggau	54,66	Inovatif
59.	Kota Binjai	54,54	Inovatif
60.	Kota Pasuruan	54,53	Inovatif
61.	Kota Bukittinggi	53,58	Inovatif
62.	Kota Tasikmalaya	52,57	Inovatif
63.	Kota Palangkaraya	52,01	Inovatif
64.	Kota Payakumbuh	51,50	Inovatif
65.	Kota Depok	49,71	Inovatif
66.	Kota Gorontalo	49,42	Inovatif
67.	Kota Salatiga	48,88	Inovatif
68.	Kota Cilegon	48,30	Inovatif
69.	Kota Gunungaitoli	48,29	Inovatif
70.	Kota Cirebon	48,18	Inovatif
71.	Kota Langsa	47,79	Inovatif
72.	Kota Manado	47,52	Inovatif
73.	Kota Ambon	47,39	Inovatif
74.	Kota Bau Bau	46,80	Inovatif
75.	Kota Pematangsiantar	46,00	Inovatif
76.	Kota Padangsidanpuan	44,29	Inovatif
77.	Kota Ternate	44,26	Inovatif
78.	Kota Subuhussalam	44,06	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
79.	Kota Pagar Alam	43,49	Inovatif
80.	Kota Banda Aceh	43,40	Inovatif
81.	Kota Tanjungbalai	42,70	Inovatif
82.	Kota Tanjung Pinang	42,38	Inovatif
83.	Kota Tarakan	40,98	Inovatif
84.	Kota Prabumulih	40,94	Inovatif
85.	Kota Tomohon	40,83	Inovatif
86.	Kota Sibolga	40,78	Inovatif
87.	Kota Lhokseumawe	29,68	Kurang Inovatif
88.	Kota Tebing Tinggi	23,52	Kurang Inovatif
89.	Kota Kupang	22,96	Kurang Inovatif
90.	Kota Sahang	19,88	Kurang Inovatif
91.	Kota Tual	15,68	Kurang Inovatif
92.	Kota Sorong	9,70	Kurang Inovatif
93.	Kota Jayapura	8,10	Kurang Inovatif

Rekapitulasi Total

Pemerintah Daerah Sangat Inovatif : 108 Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Inovatif : 309 Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kurang Inovatif : 114 Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Tidak Dapat Dinilai : 15 Pemerintah Daerah

MENTERI DALAM NEGERI,

tid

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Dr. Asmawa, SP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197410151993111003

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	%	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah adalah upaya untuk mendorong penggunaan produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri, termasuk produk-produk dari UMKMK, dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah.	((Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1))/ Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)) X 100%	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah bertujuan untuk memajukan perekonomian nasional, menciptakan kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKMK. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar bagian pengadaan barang/jasa yang dibelanjakan terhadap produk dalam negeri termasuk produk UMKM	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
3	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama adalah perbandingan antara jumlah total proyeksi kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama dengan jumlah kontrak keseluruhan.	(Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama Tahun (n)/ Jumlah kontrak keseluruhan Tahun (n)) x 100% Keterangan: Jumlah Kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu Pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = jumlah kontrak proyek konstruksi infrastruktur yang meliputi dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi melalui kontrak konstruksi, yang memiliki nilai di atas 50 Milyar Rupiah, yang ditandatangani pada triwulan pertama (Januari-Maret) Jumlah kontrak keseluruhan tahun n = keseluruhan jumlah kontrak infrastruktur pada tahun pelaporan	Persentase ini digunakan untuk mengukur kinerja pengadaan konstruksi di tingkat kabupaten/kota, khususnya terkait dengan proyeksi yang berhasil ditandatangani pada awal tahun	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
4	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan adalah perbandingan antara jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan dengan total belanja operasi dan modal pada periode waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam sektor publik.	(Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan / Total belanja operasi dan modal) x 100% Keterangan: Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = nilai belanja operasi (satuan rupiah) diluar belanja pegawai yang meliputi belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial dan nilai belanja modal yang pelaksanaanya dilakukan melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa. Jumlah belanja operasi dan modal = jumlah nilai keseluruhan belanja operasi dan modal	Rasio ini menunjukkan seberapa besar bagian dari anggaran yang dibelanjakan melalui mekanisme pengadaan yang terstruktur. Semakin tinggi rasionya, semakin besar bagian belanja yang dilakukan secara transparan dan melalui prosedur pengadaan yang terstandarisasi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD							
LXXI	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		Nilai dari survey tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap kualitas layanan administrasi dan keuangan	Total dari nilai persepsi per unsur/ Total unsur yang terisi x Nilai penimbang	Semakin tinggi nilai maka semakin baik kualitas pelayanan administrasi dan keuangan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD	Sekretariat DPRD	
2	Persentase Terlaksananya Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	%	Rata-rata capaian terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Total dari persentase ketetapan Perda APBD Tahun N + Persentase penetapan rancangan peraturan daerah tahun N + Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibagi 3	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dukungan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	
5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah							
LXXIII	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Menunjukkan hasil Inovasi daerah yang terverifikasi berdasarkan penilaian dari Kemendagri	Jumlah total nilai inovasi daerah yang terverifikasi berdasarkan penilaian dari Kemendagri	Semakin terpenuhinya komponen kategori penilaian dari Kemendagri maka nilai indeks inovasi daerah semakin tinggi	Surat Penilaian Inovasi Daerah dari Kemendagri	IKD RPJMD
LXXIV	ASPEK PELAYANAN UMUM						

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks	Mengukur keselarasan antara dokumen perencanaan dan kesesuaian capaian kinerja pelaksanaan pembangunan.	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan = $\frac{(60\% \times A) + (40\% \times B)}{100}$ A = Keselarasan antar dokumen perencanaan (persentase Keselarasan program RKPD dengan RPJMD) B = capaian program RKPD (Persentase capaian kinerja RKPD terhadap target kinerja RKPD)	Keselarasan dokumen perencanaan dapat membantu dalam menilai efektifitas perencanaan pembangunan daerah dan mengidentifikasi area perbaikan. Jika antar dokumen selaras semakin naik Kualitas Perencanaan Pembangunan dan kesesuaian capaian kinerja pelaksanaan pembangunan juga tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	
2	Persentase keselarasan perencanaan daerah	%	Menghitung rerata capaian: 1. Persentase kesesuaian program RKPD terhadap RPJMD DO: Menghitung rerata capaian realisasi program perencanaan RKPD terhadap RPJMD 2. Persentase capaian kinerja RKPD terhadap target kinerja RKPD DO: Menghitung rerata capaian realisasi evaluasi pembangunan daerah 3. Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Program sektoral (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. DO: Menghitung rerata kesesuaian program sektoral Renja PD dengan program sektoral RKPD	Rerata: 1. Jumlah program RKPD dibagi program RPJMD x100% 2. Rerata capaian program RKPD 3. Rerata dari: a. Jumlah program Renja PD dibagi jumlah program di RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan x 100% b. Jumlah program Renja PD dibagi jumlah program di RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia x 100% c. Jumlah program Renja PD dibagi jumlah program di RKPD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) x 100%	Jika antara program RKPD sesuai dengan program RPJMD maka persentase kesesuaiannya tinggi dan kesesuaian capaian kinerja pelaksanaan pembangunan juga tinggi serta jika dokumen Renja PD selaras dengan dokumen RKPD maka persentase keselarasan tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Disusun Berdasarkan Hasil Riset, Penelitian, dan Inovasi	%	Menunjukkan persentase policy brief atas penelitian dibagi kajian yang telah dilaksanakan Bappeda.	Jumlah policy brief yang disusun dibagi Jumlah kajian yang dilaksanakan x 100%	Semakin banyak hasil policy brief yang di implementasikan semakin baik	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	
4	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	Menunjukkan Angka Indeks Daya Saing Daerah	Jumlah Indeks Daya Saing Daerah yang terverifikasi berdasarkan penilaian dari BRIN/Data BPS	Semakin terpenuhinya komponen 12 pilar penilaian dari BRIN maka nilai Indeks Daya Saing Daerah semakin tinggi	IDSD BRIN, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	IKD RPJMD
5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah							
LXXVI	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota	Indeks dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 0–10.	Menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau rendahnya kualitas penggunaan produk/layanan keuangan.	Bappenas	IKD RPJMD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)					(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bagian Organisasi	Kematangan Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai kematangan organisasi bagi Badan, Sekretariat, Dinas pada Pemerintahan Daerah diukur dengan menggabungkan nilai seluruh Badan, Sekretariat, Dinas, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh Badan, Sekretariat, Dinas pada Pemerintahan Daerah	Total Nilai Badan, Sekretariat, dan Dinas / Jumlah seluruh Badan, Sekretariat dan Dinas Tingkat Kematangan: 1) Sangat Rendah = 10 -19 2) Rendah = 19,1 -28 3) Sedang = 28, 1 -37 4) Tinggi = 37,1 -46 5) Sangat Tinggi = 46,1 -5	Semakin tinggi Indeks Kematangan Organisasi Badan, Sekretariat, dan Dinas, maka semakin baik tata kelola organisasi Badan, Sekretariat, dan Dinas	Bagian Organisasi	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik (%)	Perbandingan antara realisasi capaian implementasi inovasi layanan publik dengan target capaian implementasi inovasi layanan publik	Realisasi capaian implementasi inovasi layanan publik / target capaian implementasi inovasi layanan publik	Semakin banyak inovasi layanan publik yang diimplementasikan maka sebaik baik layanan publik yang diberikan	Bagian Organisasi	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bagian Pemerintahan	Kematangan Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai kematangan organisasi bagi Kapanewon diukur dengan menggabungkan nilai seluruh Kapanewon kemudian dibagi dengan jumlah seluruh Kapanewon	Total Nilai Kapanewon / Jumlah seluruh Kapanewon Tingkat Kematangan: 1) Sangat Rendah = 10 -19 2) Rendah = 19,1 -28 3) Sedang = 28, 1 -37 4) Tinggi = 37,1 -46 5) Sangat Tinggi = 46,1 -5	Semakin tinggi nilai kematangan organisasi Kapanewon, semakin baik kinerja Kapanewon dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan keistimewaan di Kapanewon	Bagian Pemerintahan	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang dimaksud adalah dokumen perencanaan keistimewaan Urusan Pertanahan dan tata ruang	Jumlah realisasi Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan tata ruang yang direncanakan dibagi jumlah Target Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan tata ruang yang direncanakan dikalikan 100%	Jika Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang sesuai dengan regulasi maka Persentase kesesuaian dokumen tinggi	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di bidang Kesehatan	Persentase pelayanan Kesehatan tradisional di Kabupaten Gunungkidul	Menghitung perbandingan antara jumlah inovasi publik yang telah diimplementasikan sesuai dengan rencana kerja atau target, dengan jumlah total inovasi publik yang direncanakan dalam periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase	(Jumlah inovasi yang diimplementasikan dibagi Jumlah inovasi yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi semakin baik	UPT Puskesmas Semanu I	1.02.0.00.0.00.01.0025 - UPT Puskesmas Semanu I
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang dimaksud adalah dokumen perencanaan keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah realisasi dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang direncanakan dibagi jumlah target dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang direncanakan dikalikan 100%	Jika Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan sesuai dengan regulasi maka Persentase kesesuaian dokumen tinggi	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bidang Perbendaharaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanan (%)	Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang dimaksud adalah dokumen pengendalian urusan keistimewaan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Jika Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan sesuai dengan regulasi maka Persentase kesesuaian dokumen tinggi	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bidang Perkeonomian dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang dimaksud adalah dokumen perencanaan keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah realisasi Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang direncanakan dibagi jumlah target Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang direncanakan dikalikan 100%	Jika Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan regulasi maka Persentase kesesuaian dokumen tinggi	Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bidang Perencanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	Dokumen perencanaan urusan keistimewaan yang dimaksud adalah dokumen usulan perencanaan urusan keistimewaan	Jumlah realisasi Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Jika Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan sesuai dengan regulasi maka Persentase kesesuaian dokumen tinggi	Bidang Perencanaan	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)					(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang dimaksud adalah dokumen pengendalian urusan keistimewaan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Jika Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan sesuai dengan regulasi maka Persentase kesesuaian dokumen tinggi	Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Gedangsari	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Gedangsari	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsari
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Girisubo	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Girisubo	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kapanewon Girisubo
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Karangmojo	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Karangmojo	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Ngawen	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Ngawen	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kapanewon Ngawen
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Nglipar	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Nglipar	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kapanewon Nglipar
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Paliyan	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Paliyan	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kapanewon Paliyan
terlaksananya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kapanewon Panggang	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Panggang	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang
Terlaksananya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kapanewon Playen	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Playen	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kapanewon Playen

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)					(15)
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
Meningkatnya fasilitasi penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi	Persentase fasilitasi penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi terlaksana (%)	Mengukur penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi yang terfasilitasi	Jumlah kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi yang terfasilitasi/ Jumlah kelompok pakar dan tenaga ahli x 100%	Semakin tinggi persentase maka semakin baik layanan fasilitasi penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi yang dapat mendukung kinerja DPRD	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penetapan Perda APBD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	Mengukur capaian perda APBD yang ditetapkan tepat waktu Tahun N	Jumlah peraturan daerah APBD yang ditetapkan tepat waktu/ jumlah rancangan peraturan daerah APBD yang ditetapkan x 100%	Semakin tinggi persentase maka semakin baik kualitas perda APBD yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	Mengukur capaian pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah pada Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Bidang Perekonomian serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun N	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun N/ Target laporan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun N x 100%	Semakin tinggi persentase maka semakin baik kinerja DPRD dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengawasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	Mengukur capaian penetapan rancangan peraturan daerah yang ditetapkan tahun N	Jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan tahun N/ jumlah rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah yang ditetapkan tahun N x 100%	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak ranperda yang dibahas DPRD bersama Pemerintah Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN						
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Bidang Sekretariat	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)					(15)
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan daerah	Persentase Capaian Kinerja RKPD Terhadap Target Kinerja RKPD (%)	Menunjukkan Capaian Kinerja RKPD	Rerata capaian program RKPD	Semakin tinggi tingkat capaian RKPD menunjukkan kinerja PD semakin baik	Bidang Risnovedal	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap RPJMD (%)	Menunjukkan Kesesuaian Program RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program RKPD dibagi jumlah program RPJMD x100%	Jika antara program RKPD sesuai dengan program RPJMD maka persentase kesesuaiannya tinggi	Bidang Perencanaan	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	Menunjukkan keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah program Renja PD dibagi jumlah program di RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan x 100%	Jika Renja PD selaras dengan RKPD maka persentase keselarasan antar dokumen pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan tinggi	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	Menunjukkan Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah program Renja PD dibagi jumlah program di RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia x 100%	Jika Renja PD selaras dengan RKPD maka persentase keselarasan antar dokumen pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tinggi	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) (%)	Menunjukkan Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah program Renja PD dibagi jumlah program di RKPD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) x 100%	Jika Renja PD selaras dengan RKPD maka persentase keselarasan antar dokumen pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) tinggi	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5.02 - KEUANGAN						
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu (%)	Penyusunan Rencan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah melalui tahapan persetujuan bersama Bupati dengan DPRD dan Evaluasi Gubernur selanjutnya ditetapkan menjadi APBD	Penetapan APBD paling lambat 31 Desember Tahun sebelumnya nilai 100	1. Penetapan sampai dengan 31 Desember Tahun sebelumnya : 100% 2. Penetapan melebihi 31 Desember Tahun sebelumnya : 50%	Proses jadwal sidang Paripurna DPRD	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)					(15)
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	Suatu ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah lulus mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi teknis dibandingkan dengan rencana atau target yang telah ditetapkan	Jumlah ASN yang lulus diklat/jumlah ASN yang mengikuti diklat X 100%	Penilaian terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan Diklat, semakin besar persentasenya semakin baik tingkat keberhasilannya	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Memecahkan Masalah Yang Termanfaatkan Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	Hasil kajian yang dilaksanakan Bappeda dalam termanfaatkan dalam perumusan kebijakan dalam penyelesaian masalah daerah	(jumlah kebijakan daerah berbasis bukti hasil kajian N-1 Bappeda/ jumlah kajian berbasis bukti) x 100%	Semakin tinggi prosentase kajian yang termanfaatkan semakin baik	Hasil Kajian, Bidang Risnovedal	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)	1. Menunjukan tingkat keikutsertaan perangkat daerah dalam inovasi daerah yang mendapatkan pendampingan dalam inovasi daerah 2. menunjukkan jumlah riset yang disusun	Rerata dari :1. Jumlah perangkat daerah yang input inovasi dalam aplikasi/jumlah perangkat daerah yang mendapat pendampingan x100 2.Jumlah realisasi naskah riset disusun dibagi target naskah riset yang tersusun x 100%	Semakin tinggi prosentase keikutsertaan perangkat daerah semakin baik dan naskah riset yang tersusun semakin banyak maka Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah semakin tinggi	Data IID, Bidang Risnovedal	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH						
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Inspektorat Daerah	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1 (%)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 adalah ukuran kinerja yang menunjukkan sejauh mana entitas pemerintah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterbitkan pada tahun anggaran sebelumnya (tahun N-1)		ketuntasan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK menunjukkan komitmen tinggi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta kesadaran terhadap pentingnya perbaikan tata kelola dan akuntabilitas keuangan.	1. Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan oleh BPK 2. SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) BPK RI	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦧꦼꦩꦼꦫꦶꦠꦏꦁꦧꦼꦩꦼꦫꦶꦠꦏꦁꦧꦼꦩꦼꦫꦶꦠ

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Laman bappeda.gunungkidulkab.go.id, Posel bappeda@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 20 Juni 2025

Nomor : B/000-7.2/1150/2025
Sifat : Biasa
Lampiran: 1 Lembar
Hal : Undangan

Yth. Terlampir

di
WONOSARI

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penyusunan Indikator Renstra Bappeda Tahun 2025-2029, kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam pertemuan yang akan diselenggarakan pada:

hari/ tanggal : Senin/ 23 Juni 2025
waktu : 13.00 WIB – Selesai
tempat : Ruang Rapat II Bappeda Kab. Gunungkidul
acara : Rapat Koordinasi Pembahasan Indikator Renstra Bappeda Tahun 2025-2029

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih,

KEPALA



MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197502221993111001

Lampiran Surat

Nomor : B/000-1.2/1750/1842

Tanggal: 20 Juni 2025

Daftar Undangan

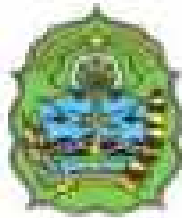
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
2. Sekretaris Bappeda Kabupaten Gunungkidul
3. Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kabupaten Gunungkidul
4. Kepala Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kabupaten Gunungkidul
5. Kepala Bidang Infrastruktur Pembangunan Wilayah Bappeda Kabupaten Gunungkidul
6. Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Kebudayaan Bappeda Kabupaten Gunungkidul
7. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Bappeda Kabupaten Gunungkidul
8. Ketua Tim Kerja Rencana Pembangunan Daerah
9. Ketua Tim Kerja Rencana Pembangunan Wilayah
10. Ketua Tim Kerja Pengelola Data Pembangunan
11. Ketua Tim Kerja Pertanian, Perikanan dan Kelautan
12. Ketua Tim Kerja Industri dan Jasa
13. Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Ketua Tim Kerja Infrastruktur
15. Ketua Tim Kerja Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
16. Ketua Tim Kerja Komunikasi, Informatika dan Kebencanaan
17. Ketua Tim Kerja Pendidikan dan Kebudayaan
18. Ketua Tim Kerja Pemerintahan
19. Ketua Tim Kerja Kesehatan dan Sosial
20. Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Evaluasi
21. Ketua Tim Kerja Pelaporan
22. Ketua Tim Kerja Riset dan Inovasi Daerah
23. Ketua Tim Kerja Perencanaan Sekretariat
24. Kepala Sub Bagian Umum
25. Kepala Sub Bagian Keuangan
26. Staf Ketua Tim Kerja Perencanaan Sekretariat



MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197502221993111001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

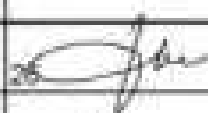
Badan Perencanaan Pembangunan

Jl. Satria No. 3 Wonosari, Gunungkidul. Telp. 0274-391751, Fax 0274-391701

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : RR II Bappeda
Acara : Rapat Koordinasi Pembahasan Indikator Renstra Bappeda Kab. GK

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Hana RV	Sehr	1	f
2	Alien	Bappeda	2	b
3	M. F. J. K. V	IPW	3	✓
4	Ani Nur Aida	Rica	4	aida
5	Murunggoro	Ramadhan	5	f
6	Agung WD	PPM	6	Ch.
7	fransiska N.S	IPW	7	1
8	Renova	PPM	8	✓
9	Si H H	PKS	9	✓
10	Fent	Kep. D	10	b
11	Asih W		11	f
12	Kusrianti	sekretaris	12	DRS
13	Nona	sekretaris	13	Ch
14	Enka	PPM	14	✓
15	Fatchi	Ac. Ren	15	f
16	Irfah Bakti U	Eksternal	16	✓
17	~Juli Thi	-	17	f
18	Danu Setiawan	"	18	Danu
19	Triyanto W. M	PSKS	19	A
20	Murpanti G	PSKS	20	Vad
21	Siti Fatmahan 2	PSKS	21	fat
22	Azzahra		22	gaf
23	A'ida P.A	Bappeda	23	gaf

24	Christina	Wibisono		24	
25	Suparno	II	25		
26	FL ANDI P	Supple			26 
27	Wito W	I	27		
28	Purnamasari	I			28 
29	Tumpeng W		29		
30	Sulistriani	Selamat			30 

PPTK



YULITA SAVITRI SE
NIP. 198007112010012003



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦑꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦫꦤꦥꦼꦫꦺꦤꦁꦏꦸꦭꦤꦼꦢꦫꦤ

Jalan Satria 3, Wonorejo, Gunungkidul Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

LAPORAN HASIL RAPAT

Rapat	: Rapat Koordinasi Pembahasan Indikator Renstra Bappeda Kabupaten Gunungkidul.
Hari/Tanggal	: Senin, 23 Juni 2025
Waktu Rapat	: 13.00 wib - selesai
Ruang Rapat	: Ruang Rapat 2 Bappeda Kabupaten Gunungkidul

Hasil Kegiatan Rapat :

1. Rapat dilaksanakan dalam rangka membahas indikator program dan kegiatan sesuai dengan arahan bidang organisasi agar dalam Renstra 2025 – 2029 setiap 1 bidang 1 outcome program dan setiap ketua tim kerja/kasubbag/kasubbid 1 output kegiatan.
2. Bappeda memiliki 1 program baik dari Dana Keistimewaan maupun APBD digunakan untuk beberapa bidang begitu pula kegiatan mempunyai beberapa sub kegiatan untuk bidang yang berbeda.
3. Rapat untuk menyepakati narasi outcome, output dan rumus perhitungan beserta targetnya. Dan dikarenakan di program perencanaan, pengendalian dan evaluasi indikator outcome beserta target berubah maka indikator sasaran dan definisi operasionalnya berubah.
4. Terkait perubahan sasaran Bappeda, maka perlu dikoordinasikan dengan Bagian Organisasi karena rumus IKU PD yang akan di SK Bupati akan mengalami perubahan.

Menulis,


Yulita Savitri



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦏꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦫꦤꦥꦼꦂꦺꦤꦏꦤ꧀ꦧꦤꦥꦼꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Satra 3, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701
Laman bappeda.gunungkidulkab.go.id, Email bappeda@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 29 Agustus 2025

Nomor : 100.1.6/203/2025
Sifat : Biasa
Lampiran: 1 Lembar
Hal : Undangan

Yth. Terhampir

di
Wonosari

Sehubungan dengan Penyusunan Data Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2025, kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

hari/ tanggal : Kamis/ 28 Agustus 2025
waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
tempat : Ruang Rapat 1 Bappeda Kabupaten Gunungkidul
acara : Rakor Capaian Kinerja Semester 1 dan Tindak Lanjut Semester 2

Demikian undangan disampaikan, atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terimakasih

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,



Mohamad Arif Aldian,S.IP,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.197502221993111001

Lampiran Surat

Nomor : 100.1.6/203/2025

Tanggal: 29 Agustus 2025

Daftar Undangan

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
2. Sekretaris Bappeda Kabupaten Gunungkidul
3. Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kabupaten Gunungkidul
4. Kepala Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kabupaten Gunungkidul
5. Kepala Bidang Infrastruktur Pembangunan Wilayah Bappeda Kabupaten Gunungkidul
6. Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Kebudayaan Bappeda Kabupaten Gunungkidul
7. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Bappeda Kabupaten Gunungkidul
8. Ketua Tim Kerja Pengelola Data Pembangunan
9. Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Ketua Tim Kerja Infrastruktur
11. Ketua Tim Kerja Pemerintahan
12. Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Evaluasi
13. Kepala Sub Bagian Umum
14. Kepala Sub Bagian Keuangan
15. Ketua Tim Kerja Perencanaan

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,



Mohamad Arif Aldian, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197502221993111001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jl. Sabria No. 3 Wonosari, Gunungkidul, Telp. 0274-391761, Fax 0274-391761

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis/ 28 Agustus 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : RR I Bappeda
Acara : Rakor Capaian Kinerja Semester I dan Tindak Lanjut Semester II

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Hariyanto	Sekda	1	[Signature]
2	[Signature]	Bupati	2	[Signature]
3	Yulita	Bappeda	3	[Signature]
4	Lia N	"	4	[Signature]
5	Krisnawati	Sekretariat	5	[Signature]
6	Tri Yuni	Prasman	6	[Signature]
7	Krisyanti	Sekretariat	7	[Signature]
8	Indah Bakti U	Bappeda	8	[Signature]
9	Pan Gdr. Istanto	Bappeda	9	[Signature]
10	Fendi	Bappeda	10	[Signature]
11	Murpenta G	Bappeda	11	[Signature]
12	Ayda Niwa	IPW	12	[Signature]
13	[Signature]	Bupin	13	[Signature]
14	Tut H	Pekab	14	[Signature]
15	Widada Syamir	IPW	15	[Signature]

PPID

YULITA SAVITRI SE

NIP. 198007112010012003



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

amasa Inyana Gana Inyana

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 381761, Faksimili: (0274) 381701
Posel: bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman: bappeda.gunungkidulkab.go.id

LAPORAN HASIL RAPAT

Rapat	: Rakor Capaian Kinerja Semester 1 dan Tindak Lanjut Semester 2
Hari/Tanggal	: Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu Rapat	: 10.00 wib - selesai
Ruang Rapat	: Ruang Rapat 1 Bappeda Kabupaten Gunungkidul

Hasil Kegiatan Rapat :

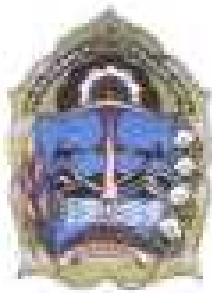
1. Rapat dilaksanakan dalam rangka membahas capaian kinerja keuangan dan fisik semester 1 dan tindak lanjut semester 2 program dan kegiatan Bappeda tahun 2025.
2. Page anggaran total adalah Rp.7.436.748.865, sampai dengan bulan juni terealisasi sebesar Rp.3.020.480.172,- dengan target fisik 45,52% terealisasi 48,17%.
3. Pada subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD target belum tercapai karena masih proses penyusunan rka perubahan. Penyediaan gaji dan tunjangan sesuai dengan kebijakan pemberian gaji dan tunjangan. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dikarenakan penyusunan laporan sesuai dengan tata cara. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Belum ada undangan/ penawaran untuk bimbingan teknis yang berbayar. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan belum tercapai karena realisasi fisik sesuai dengan jumlah hari kerja/ pengiriman surat kabar. Fasilitas Kunjungan Tamu realisasi sesuai dengan kunjungan tamu. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD belum mendekati target dikarenakan perjalanan dinas luar daerah tergantung dengan undangan dan disposisi dari atasan. Pemeliharaan kendaraan sesuai dengan kebutuhan. Pemeliharaan mebel belum dilakukan karena belum ada mebel yang rusak. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPIPD, RPMD dan RKPD); Belanja Narasumber Belum Terealisasi dikarenakan produk hukum belum terealisasi.
4. Dari hasil evaluasi semester 1 diharapkan untuk semester 2 capaian dapat tercapai sesuai target yang direncanakan baik keuangan maupun fisiknya.

5. Keadaa lainnya jika dibandingkan dengan pagu anggaran total Bappeda dalam 1 tahun anggaran adalah belum dapat melaksanakan kegiatan karna melakukan pergeseran atau rencana perubahan anggaran tahun 2025.

Notulis,



Yulita Savitri



Wonosari, 8 Desember 2025

Nomor : 000.7.2.4/299/2025
Sifat : Segera
Lampiran: 1 lembar
Hal : Undangan

Yth. Bapak/Tertanggung Jawab



Wondersri

Menindaklanjuti surat undangan dari Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta Nomor B/000.7.2.4/1688/B1 tanggal 5 Desember 2025 perihal Undangan *Kick off Meeting* Penyusunan RKPD DiY Tahun 2027. Dengan ini mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara menghadiri acara yang akan dilaksanakan pada:

hari	:	Kamis
tanggal	:	11 Desember 2025
pukul	:	09.00 WIB - selesai
tempat	:	Ruang Rapat Kepala Bappeda Gunungkidul
acara	:	Mengikuti <i>Kick off Meeting</i> Penyusunan RKPD DIY Tahun 2027 melalui aplikasi Zoom Meeting.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Lampiran Surat
Nomor : 000.7.2.4/299/2025
Tanggal: 8 Desember 2025

Daftar Undangan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Gunungkidul
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Gunungkidul
3. Kepala Bidang Beserta Ketua Tim Kerja pada Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan Bappeda Kab. Gunungkidul
4. Kepala Bidang Beserta Ketua Tim Kerja pada Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kab. Gunungkidul
5. Kepala Bidang Beserta Ketua Tim Kerja pada Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kab. Gunungkidul
6. Kepala Bidang Beserta Ketua Tim Kerja pada Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian
7. Kepala Bidang Beserta Ketua Tim Kerja pada Bidang Perencanaan Bappeda Kab. Gunungkidul
8. Staf Bidang Perencanaan Bappeda Kab. Gunungkidul

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah,



Mohamad Arif Akilan, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197502221993111001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Satya 3, Wonorejo, Gunungkidul 55812

Telepon : (0274) 391701, Faksimile : (0274) 391701

E-mail : bappeda@gunungkidulkab.go.id, Laman : bappeda.gunungkidulkab.go.id

DAFTAR HADIR

KEGIATAN : Mengikuti Kick off Meeting Penyusunan RKPd DIY Tahun 2027 melalui aplikasi Zoom Meeting.

HARI / TGL : Kamis, 11 Desember 2025

WAKTU : 09.00 WIB – selesai

TEMPAT : Ruang rapat Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul

NO	NAMA	LIP	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	M. Arief Aldian	L		1
2	M. Iqbal			2
3	Rahmat	P	Sekretariat	3
4	Ferika	P	Bappeda	4
5	Syng P	L	Bappeda	5
6	Octavianto R		Bappeda IPW	6
7	Mardiana		Kominfo	7
8	Ari Nur Aida	P	PSKb	8
9	Nur Samudra	L	Bappeda PSKb	9
10	Triana Ika M	P		10
11	Eka	P	Bappeda	11
12	Tri Marseno	L	Bidren	12
13	Ferdhi	L	Bidren	13
14	Fernando Kencana	L	Bappeda	14
15	Nari I. Uta	P	Bappeda	15
16	Selca	P	Bappeda	16
17	Ihami F	P	Bappeda	17
18	Siska P	P	Bappeda	18
19	KORO WEL	L	Bappeda	19
20	Khairunnisa	P	Sekretariat Bappeda	20
21	YL ANDI	L		21
22	Yulha	P	Bappeda	22
23	Sulistriani	P	"	23
24	A'ida R.A	P	"	24
25	Nova	P	"	25
26	Kristi Kusni	P	"	26

NO	NAMA	LP	ALAMAT	TANDA TANGAN
27	Widadati Syamsi	P		27 
28	Anisa Numa	V		28 
29	W. Harsono	L		29 
30	Nurpanti G	P		30 

Wonosari,
PPTK

Khrisnawati Nuryantari, A.Md
NIP. 198111232005012007

- Sektor dominan: industri pengolahan, akomodasi & makan-minum, pendidikan, pertanian.
- Tantangan: ketimpangan wilayah utara-selatan, kemiskinan di atas nasional, dan masalah persampahan (TPA Piyungan)
- b. Evaluasi Makro 2025
 - Pertumbuhan ekonomi TVV I-III 2025: 5,33%, sedikit di atas target.
 - Kemiskinan dan TPT masih perlu perhatian
- c. Arah Kebijakan RPJMN untuk DIY

Fokus RKP 2027: Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi

 - Kawasan Pertumbuhan: Perkotaan Yogyakarta, Aerotropolis YIA, kawasan pariwisata-ekraf unggulan.
 - Kawasan Afirmasi: Pegunungan Sewu (Gunungkidul).
 - Kawasan Swasembada Pangan-Air-Energi: Progo-Opak.

Proyeksi RPJMN untuk DIY:

 - Pertumbuhan ekonomi: 7,6%
 - PDRB per kapita: 65 juta (indikatif)
- d. Arah Transformasi
 - Penguatan ekraf dan pariwisata.
 - Peningkatan kualitas layanan kesehatan & pendidikan.
 - Pembangunan kota adaptif bencana dan berkelanjutan.
 - Transformasi hijau dan pemanfaatan kawasan konservasi.

III. Paparan Narasumber KEMENDAGRI (Bob R.F. Sagala)

- a. Prinsip Penyusunan RKPD 2027
 - Sejalan dengan RPJMN, RKP, RPJPD, dan RPJMD.
 - Mengutamakan integrasi, akuntabilitas, efisiensi, dan berbasis hasil
- b. Tantangan Nasional
 - Kesenjangan wilayah, keterbatasan pembiayaan, disrupsi teknologi, belum optimalnya koordinasi pusat-daerah.
- c. Penekanan dalam Penyusunan RKPD
 - Sinergi antar dokumen perencanaan.
 - Berorientasi pada outcome dan target RPJMN.
 - Memperhatikan hasil Rakortekrenbang & evaluasi kinerja tahun sebelumnya.
 - Efisiensi anggaran dan penguatan monitoring-evaluasi
- d. Tahapan Penyusunan RKPD 2027
 - Persiapan (Des 2025).
 - Penyusunan Rancangan Awal & Rancangan (Maret-Mei 2026).
 - Musrenbang Prov/Kab/Kota (Mei 2026).
 - Penetapan (Juni-Juli 2026).
- e. Kebijakan Baru Kemendagri
 - Pedoman Manajemen Risiko Pembangunan Daerah.
 - Pedoman Penyusunan RKPD 2027.
 - Revisi Permendagri 86/2017.

IV. Penutup:

Rapat ditutup oleh pimpinan rapat. Demikian notulen ini dibuat sebagai dokumentasi kegiatan Kick off Meeting Penyusunan RKPD DIY Tahun 2027.

Notulis,

 Tri Marsono



BAPPEDA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**